

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025



DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini berisikan gambaran umum tentang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi, pengelolaan keuangan serta pencapaian hasil-hasil dalam kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan melalui dukungan dana dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) dan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan ini disusun sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Semoga setiap kata dan tulisan dalam bahan penyusunan LPPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi yang nyata sebagai pemikiran untuk langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian khusus pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada masa mendatang.

Jambi, Februari 2026

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum Daerah	3
1.1.1.1. Data Geografis Wilayah	3
1.1.1.2. Jumlah Penduduk	4
1.1.1.3. Jumlah Kabupaten/Kota	5
1.1.2. Penjelasan Umum Perangkat Daerah.....	6
1.1.2.1. Undang – Undang Pembentukan Perangkat Daerah	6
1.1.2.2. Sumber Daya Aparatur	26
1.1.2.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	30
1.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah	33
1.1.3.1. Permasalahan Strategis [emerintah Daerah	33
1.1.3.2. Visi Misi Kepala Daerah	34
1.1.3.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan..	38
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	43
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	43
2.1.1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	44
2.1.1.1. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	44
2.1.1.2. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	46
2.1.2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	50
2.1.2.1. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	50
2.1.2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	53

2.1.3.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	56
2.1.3.1.	Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	56
2.1.3.2.	Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	60
2.2.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	64
2.2.1.	Target dan Capaian Realisasi Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	64
2.2.2.	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	66
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	82
3.1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	82
3.2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	82
3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	83
3.4.	Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	90
4.2.1.	Hambatan/Permasalahan	90
4.2.2.	Upaya Penyelesaian	90
BAB V	PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

BAB I

1.1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024	4
1.2.	Sarana dan Prasarana Berdasarkan Data Aset/Barang Milik Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025	25
1.3.	Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025...	27
1.4.	Jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025	28
1.5.	Jumlah tenaga P3K Penuh Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025	29
1.6.	Jumlah tenaga P3K Paruh Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025	29
1.7.	Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	30
1.8.	Perubahan Alokasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	32
1.9.	Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	32
1.10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	33
1.11.	Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2025	38
1.12.	Realisasi Target dan Keuangan Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2025	40

BAB II

2.1.	Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	44
2.2.	IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	45
2.3.	Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	50
2.4.	IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	51
2.5.	Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	56
2.6.	IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025	58
2.7.	Capaian NTP berdasarkan sub sektor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	64
2.8.	Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	65
2.9.	Dana APBD yang dikelola Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	66
2.10.	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	68
2.11.	Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	70
2.12.	Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	73

2.13.	Capaian Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	76
2.14.	Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025 ...	79
2.15.	Capaian Kinerja Program Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025	80

BAB III

3.1.	Anggaran Belanja APBN Menurut Satuan Kerja (Satker) dan Perubahan Alokasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi TA. 2025	83
3.2.	Capaian Program/Kegiatan Satker TP Tanaman Pangan (109119) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.....	84
3.3.	Capaian Program/Kegiatan Satker TP Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.....	85
3.4.	Capaian Program/Kegiatan Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.....	87
3.5.	Capaian Program/Kegiatan Satker TP Lahan dan Irigasi Pertanian (691331) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Peraturann Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.03/2000 tentang Tata cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga–lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 A Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propda) Provinsi Jambi Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 37);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.1.1. Penjelasan Umum Daerah

1.1.1.1. Data Geografis Wilayah

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00°45' sampai 20°45' lintang selatan dan antara 1010°10' sampai 1040°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 49.026,579 km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² terdiri dari:

- Kabupaten Kerinci 3.445,15 km² (7,03%)
- Kabupaten Merangin 7.540,12 km² (15,38%)
- Kabupaten Sarolangun 5.935,89 km² (12,11%)
- Kabupaten Batanghari 5.387,52 km² (10,99%)
- Kabupaten Muaro Jambi 5.225,80 km² (10,66%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4.546,62 km² (9,27%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5.546,06 km² (11,31%)
- Kabupaten Tebo 6.103,74 km² (12,45%)
- Kabupaten Bungo 4.760,83 km² (9,71%)
- Kota Jambi 169,89 km² (0,35%)
- Kota Sungai Penuh 364,92 km² (0,74%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.540,12 km² atau sebesar 15,38 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun

masing-masing sebesar 6.103,74 km² dan 5.935,89 km² . Luas wilayah terkecil berada di Kota Jambi yaitu sebesar 169,89 km² atau sebesar 0,35 persen dari total area.

Pengamatan Unsur Iklim diamati melalui Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Muaro Jambi. Rata-rata suhu udara adalah 27,52 derajat celcius di tahun 2023. Suhu minimum adalah 22,00 derajat celcius, lebih tinggi dibanding dengan suhu pada tahun 2022 yaitu 21,6 derajat celcius. Suhu maksimum 36,10 derajat celcius. Tekanan udara menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.008,11 mb dengan range 1.001,90 mb sampai dengan 1.019,40 mb.

1.1.1.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2024 sebanyak 3.724.284 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Provinsi Jambi mengalami kenaikan populasi sebanyak 45.115 jiwa atau 1,23%.

Adapun rincian populasi penduduk Provinsi Jambi terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

(Jiwa)					
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kerinci	250.259	251.747	253.469	255.120	256.706
2. Merangin	354.052	358.110	363.290	368.389	373.409
3. Sarolangun	290.047	293.430	297.882	302.243	306.514
4. Batang Hari	301.700	304.875	308.838	312.729	316.550
5. Muaro Jambi	402.017	406.910	412.912	418.799	424.579
6. Tanjab Timur	229.813	232.023	234.408	236.727	238.975
7. Tanjab Barat	317.498	321.210	325.849	330.474	335.069
8. Tebo	337.669	341.451	346.161	350.761	355.262
9. Bungo	362.363	366.368	371.419	376.382	381.272
10. Kota Jambi	606.200	612.717	620.308	627.774	635.101
11. Kota Sungai Penuh	96.610	97.554	98.654	99.771	100.847
JUMLAH	3.548.228	3.586.395	3.633.190	3.679.169	3.724.284

Sumber Data : BPS Provinsi Jambi

1.1.1.3. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 144 kecamatan. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.585 yang terdiri dari 1.414 desa dan 171 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Kerinci ibukota Siulak terdiri dari 18 kecamatan, 285 desa, dan 2 kelurahan.
- Kabupaten Merangin ibukota Bangko terdiri dari 24 kecamatan, 205 desa, dan 10 kelurahan.
- Kabupaten Sarolangun ibukota Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 149 desa, dan 9 kelurahan.
- Kabupaten Batang Hari ibukota Muara Bulian terdiri dari 8 kecamatan, 110 desa, dan 14 kelurahan.
- Kabupaten Muaro Jambi ibukota Sengeti terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa, dan 5 kelurahan.
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur ibukota Muara Sabak terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa, dan 20 kelurahan.
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat ibukota Kuala Tungkal terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa, dan 20 kelurahan.
- Kabupaten Tebo ibukota Muara Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 122 desa, dan 7 kelurahan.
- Kabupaten Bungo ibukota Muara Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 141 desa, dan 12 kelurahan.
- Kota Jambi ibukota Jambi terdiri dari 11 kecamatan 68 kelurahan.
- Kota Sungai Penuh ibukota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa, dan 4 kelurahan.

1.1.2. Penjelasan Umum Perangkat Daerah

1.1.2.1. Undang – Undang Pembentukan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi.

Reorganisasi UPTD-UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Tahun 2020 sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 sehingga UPTD-UPTD lingkup Dinas menjadi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD tersebut yakni (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), (3) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura, (4) UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, dan (7) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

Penguatan UPTD tersebut melalui Peraturan Gubernur Jambi yakni UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dikukuhkan dengan Pergub 6 Tahun 2018, UPTD Balai Proteksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dikukuhkan dengan Pergub 11 Tahun 2018, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura dikukuhkan dengan Pergub 12 Tahun 2018, UPTD Balai Pembibitan Ternak dikukuhkan dengan Pergub 8 Tahun 2018, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dikukuhkan dengan Pergub 7 Tahun 2018, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo dikukuhkan dengan Pergub 9 Tahun 2018, dan UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dikukuhkan dengan Pergub 10 Tahun 2018.

Adapun susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.**
- 2. Sekretariat,** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- 3. Bidang Peternakan,** terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - b. Seksi Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP).
- 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,** terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan (KSKH);
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan; dan
 - c. Kasi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) dan Pengawasan Obat Hewan (POH).

5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :

- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan; dan
- c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

7. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman;
- c. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

8. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI); dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (PPP), terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyuluhan;

- c. Seksi Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

10. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan;
- c. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. UPTD Balai Pembibitan Ternak, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Pembibit Ternak;
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Verteriner dan Klinik Hewan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Laboratorium;
- c. Kasi Klinik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemeliharaan Satwa;
- c. Seksi Konservasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun kedudukan dan tugas kelompok jabatan fungsional adalah : (1) Kelompok jabatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Jabatan Fungsional yang ada dilingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
2. Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
3. Penyuluh Pertanian;
4. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
5. Analisis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP);
6. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP);
7. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian (APSP);
8. Pengawas Bibit Ternak;
9. Pengawas Mutu Pakan;
10. Medik Veteriner;
11. Paramedik Veteriner;
12. Penata Laksana Barang; dan
13. Fungsional Umum.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, maka masing- masing Eselon III pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Peternakan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan serta koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait serta pembinaan di Bidang Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- b. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- d. Penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok;
- e. Penyediaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;

- g. Pemberian rekomendasi izin usaha di Bidang Peternakan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian serta pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;

- f. Penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- g. Penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- h. Pemberian rekomendasi dan ijin usaha di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- i. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, program dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan;
- g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keberbenihan tanaman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat;
- c. Pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih;
- d. Pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang berisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perbanyakan benih sumber;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pengamatan, peramalan, pengembangan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pemasyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengembangan dan evaluasi sarana pengendalian OPT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPTPH mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan kejadian bencana alam;
- b. Pelaksanaan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman;
- c. Pelaksanaan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
- d. Pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendalian OPT secara spesifik lokasi;
- f. Pelaksanaan pengembangan penerapan teknis pengendalian OPT;
- g. Pelaksanaan pemasyarakatan PHT;
- h. Pelaksanaan evaluasi mutu/residu serta pemantauan dampak penggunaan sarana pengendalian OPT;
- i. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan UPTD Balai;

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (PPP)

UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian (PPP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta melaksanakan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perencanaan pengembangan SDM Pertanian melalui analisa Jabatan/pekerjaan dan prioritas pembangunan wilayah kerja;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan/atau kegiatan lainnya;
- c. Pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus-menerus;
- d. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya dalam mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan/atau pembentukan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka melayani Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul dengan menerapkan prinsip pelayanan, koordinasi dan integrasi baik ke dalam maupun ke luar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Balai;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional Balai dalam rangka pelayanan terhadap Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. UPTD Balai Pembibitan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah. Secara garis besar, UPTD melaksanakan operasional pembibitan, menguji dan menerapkan teknologi pengembangan ternak, mengkaji perkembangan masing-masing ternak dan melaksanakan kebijakan pembibitan ternak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pogram kerja dan anggaran balai;
- b. Pelaksanaan operasional pembibitan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas tinggi (ternak unggul);
- d. Pelaksanaan pemeliharaan ternak Bull;
- e. Menyediakan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. Produksi semen beku keseluruh kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan pengujian dan penerapan tehnologi pengembangan ternak;
- h. Pelaksanaan pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam diagnosa penyakit hewan, pemeriksaan bahan pangan asal hewan dan bahan non asal hewan, menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. Penyiapan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pemeriksaan;
- c. Penerapan teknologi dalam pemeriksaan laboratorium;
- d. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
- e. Penyusunan rencana pengamatan penyakit hewan dan penyiapan bahan pembuatan peta penyakit;
- f. Penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan diagnosa penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet
- g. Penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa pemeriksaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo

UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di bidang pengelolaan kebun binatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa;
- b. Pelaksanaan perawatan dan pengamanan ilmu pengetahuan satwa sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
- c. Pelaksanaan tempat rekreasi alam dan ruang hijau;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi diatas, Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Gedung kantor utama, terletak di Jalan Lingkar Barat 1 KM 12 Nomor 78 Kel. Mayang Mengurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi dengan kondisi yang baik dan fasilitas yang cukup. Gedung utama meliputi ruang untuk Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Keswan dan Kesmavet. Pada area gedung utama juga ada gedung lain yaitu Gedung Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Gedung UPTD Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan serta Gedung

UPTD Balai Pembibitan Ternak. Untuk Gedung UPTD lainnya yaitu UPTD BTPPH terletak di Jl. Jend. Sudirman Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, UPTD BPSPT terletak di Jl. Jend. Sudirman No.28 Thehok Jambi, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terletak di Jl. Jambi-Palembang KM 15 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian terletak bersebelahan dengan UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alamat Jl. Jambi-Palembang KM 15 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi terletak di Jl. Kibajuri No.94 RT.02 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

- Adapun website yang tersedia melalui dtphp.jambiprov@go.id
- Laboratorium yang tersedia ada 4 (empat) yaitu (1) Laboratorium Pengamatan Hama penyakit dan Agens Hayati (LPHP) dibawah naungan UPTD BTPPH, (2) Laboratorium UPTD BPSPT, (3) Laboratorim Keswan dan Kesmavet dibawah naungan UPTD Pelayanan Keswan Kesmavet dan Klinik Hewan, dan (4) Laboratorium Inseminasi Buatan dibawah naungan UPTD Balai Pembibitan Ternak;
- Dalam rangka perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jambi, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki Balai Benih Induk (BBI) yaitu BBI Padi Sukajaya di Lubuk Ruso Muaro Jambi, BBI Palawija di Sebapo Muaro Jambi, BBI Hortikultura Sungai Tiga di Pondok Meja Muaro Jambi yang bertujuan menghasilkan Benih Dasar (BD) sebagai benih sumber untuk memperbanyak Benih Pokok (BD-BP) dan Benih Pokok (BP) sebagai sumber untuk memperbanyak Benih Sebar oleh Penangkar (BP-BR) serta pengembangan tanaman hias di Taman Anggrek Sri Soedewi Jambi;

- Selain itu dibawah UPTD BPTPH memiliki Brigade Proteksi Tanaman dan 1 unit gudang Pestisida di Mestong Muaro Jambi;
- Gudang dan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian 1 unit di Kebun Bohok Lingkar Selatan Kotabaru Jambi;
- Dalam upaya peningkatan kualitas bibit ternak dan peningkatan mutu pakan ternak, UPTD Balai Pembibitan Ternak memiliki bibit ternak yang berkualitas/ternak unggul sebanyak 44 ekor serta pengembangan dan pengelolaan lahan hijauan pakan ternak dengan menanam rumput unggul, lokasi pengembangan tersebut yaitu di UPTD Balai Pembibitan Ternak 0,4 Ha, Holding Ground Pijoan 4 Ha dan BIBD Sungai Gelam 100 Ha.
- Upaya pelestarian satwa/satwa langka untuk dilindungi dari kepunahan sebanyak 206 satwa dengan luas lahan 1,6 Ha.

Adapun sarana dan prasarana berdasarkan Data Aset/Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Berdasarkan Data Aset/Barang Milik Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025.

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG
1.	PERALATAN DAN MESIN	2.402	
	- Alat Besar	143	Baik
	- Alat Angkutan	285	Baik
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	34	Baik
	- Alat Pertanian	470	Baik
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	960	Baik
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	92	Baik
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	8	Baik
	- Alat Laboratorium	122	Baik
	- Alat Persenjataan	8	Baik
	- Komputer	270	Baik
	- Alat Keselamatan Kerja	3	Baik
	- Peralatan Olahraga	7	Baik
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	326	
	- Bangunan Gedung	319	Baik
	- Monumen	1	Baik

	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	6	Baik
3.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	76	Baik
	- Jalan dan Jembatan	9	Baik
	- Bangunan Air	34	Baik
	- Instalasi	32	Baik
	- Jaringan	1	Baik
4.	ASET TETAP LAINNYA	1.359	Baik
	- Hewan	847	Baik
	- Tanaman	2	Baik
	- Barang Koleksi Non Budidaya	510	Baik
5.	ASET LAINNYA	3.657	
	- Aset Lain lain	3.657	Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat
	TOTAL	7.820	

1.1.2.2. Sumber Daya Aparatur

Suatu organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sampai tahun 2025 sebanyak 208 orang, P3K Penuh Waktu 15 orang dan P3K Paruh Waktu 204 orang. Pegawai PNS terdiri dari 110 pegawai laki-laki dan 98 pegawai perempuan. Jika dirinci berdasarkan golongan maka jumlah PNS golongan IV berjumlah 34 orang, golongan III berjumlah 141 orang, golongan II berjumlah 31 orang dan golongan I berjumlah 2 orang. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berpendidikan setingkat SD (2 orang), SLTP (3 orang), SLTA (52 orang), D-III (6 orang), S-1 (108 orang) dan S-2 (37 orang).

Selengkapnya rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025.

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
1.	IV	D		1																	1	1		
		C		1							1		1								1	2		
		B		4	1						5		1	1							2	7		
		A		4	5						9		7	8							15	24		
	JML G IV																					34		
2	III	D		5	20						25		10	27							37	62		
		C		2	14	1			1		18		1	15	1						17	35		
		B			8	1			3		12		1	2	3				1		7	19		
		A			5				12		17			1				7			8	25		
	JML G III																					141		
3	II	D						18			18							6			6	24		
		C						3	1		4							1	1		2	6		
		B									-										0	-		
		A								1	1										0	1		
	JML G II																					31		
4	I	D									-									1	1	1		
		C									-									1	1	1		
		B									-										0	-		
		A									-										0	-		
	JML G I																					2		
JUMLAH		-	16	54	2	-	-	37	2	-	110	-	21	54	4	-	-	15	1	2	98	208		

Adapun jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada pada Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.4. Jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025.

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				
a.	Sekretaris	5	1	21	27
b.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	1	1	6
c.	Bidang Peternakan	4	7	3	14
d.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	13	3	20
e.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	4	10	3	17
f.	UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	0	2	6
g.	UPTD Pembibitan	4	3	5	12
h.	UPTD Kebun Binatang	4	0	3	7
i.	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	19	5	28
j.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	21	10	35
k.	UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	2	21	27
l.	UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	4	4	1	9
TOTAL		49	81	78	208

Untuk jumlah P3K Penuh Waktu sebanyak 15 orang terdiri dari 4 orang pegawai laki-laki dan 11 orang pegawai perempuan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.5. Jumlah tenaga P3K Penuh Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025.

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24		
1	IX			3		1						4			8						8	8		
2	X											-			3						3	3		
JUMLAH		-	-	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	15		

Untuk jumlah P3K Paruh Waktu sebanyak 204 orang terdiri dari 147 orang pegawai laki-laki dan 57 orang pegawai perempuan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.6. Jumlah tenaga P3K Paruh Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025.

NO	NAMA OPD	LAKI - LAKI										JML	PEREMPUAN										JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD	S.3		S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN																								
a.	Sekretaris			14				11	1	1	27		1	13	1			4				19	46	
b.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1	4	1			3			9			1								1	10	
c.	Bidang Peternakan			5				1			6											0	6	
d.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura			5							5				1			1				2	7	
e.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian			3	1			2			6			2								2	8	
f.	UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat			1				2			3			1	1							2	5	
g.	UPTD Balai Pembibitan Ternak			4	1			11	2		18		1	3								4	22	
h.	UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo			3	2			23		1	29			1				4	2			7	36	
i.	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan			3				3			6			2								2	8	
j.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura			6	1			11	1		19			6				5				11	30	
k.	UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura			2				9			11			2				4	1			7	18	
l.	UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian			5				3			8											0	8	
JUMLAH		-	1	55	6	-	-	79	4	2	147	-	2	31	3	-	-	18	3	-	-	57	204	

1.1.2.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sebagai SKPD yang ada memungut retribusi daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memiliki target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Adapun untuk alokasi anggaran pendapatan menurut jenis pendapatan, pada tahun 2025 ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tidak ada perubahan baik itu anggaran dan target sampai akhir tahun 2025. Terdapat 5 (lima) jenis setoran untuk pendapatan ini. Adapun target dan realisasi anggaran pendapatan menurut jenis pendapatan pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.7. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

JENIS SETORAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir		18.000.000,-	18.000.000,-
-	Sewa lahan parkir	18.000.000,-	18.000.000,-
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman		46.500.000,-	55.025.000,-
-	Penjualan Ternak Tidak Layak Bibit	3.000.000,-	10.640.000,-
-	BBI Padi Sukajaya Lubuk Ruso	15.000.000,-	15.100.000,-
-	BBI Hortikultura Sungai Tiga	12.500.000,-	12.525.000,-
-	BBI Palawija Sebapo	16.000.000,-	16.760.000,-
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan		10.000.000,-	1.480.000,-
-	Penjualan Ternak Potong Paksa	10.000.000,-	1.480.000,-
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga		1.988.000.000,-	2.241.614.000,-

-	Karcis Kebun Binatang (Taman Rimbo)	1.957.000.000,-	2.210.537.000,-
-	Karcis Kuda Tungangan	7.000.000,-	7.000.000,-
-	Karcis Gajah Tungangan	9.000.000,-	9.000.000,-
-	Taman Anggrek (Karcis Taman Anggrek, sewa Joglo, Penjualan Bibit Anggrek dll)	15.000.000,-	15.077.000,-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		42.000.000,-	40.610.000,-
-	Sewa kios	9.000.000,-	9.000.000,-
-	Biaya Pelayanan Jasa Laboratorium	33.000.000,-	31.610.000,-
TOTAL KESELURUHAN		2.104.500.000,-	2.356.729.000,-

1.1.2.3.2. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan alokasi anggaran belanja tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran APBD Murni ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp. 58.956.730.310,-. Kemudian melakukan efisiensi/pergeseran anggaran sehingga anggaran yang ditetapkan tanggal 14 April 2025 sebesar Rp. 56.255.110.998,-. Pada tanggal 6 November 2025, anggaran APBD Perubahan (APBD-P) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 2.216.850.000,- sehingga pagu alokasi anggaran menjadi Rp. 58.471.960.998,-. Adapun rincian anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.8. Perubahan Alokasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

No.	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA		
		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total (Rp)
1.	APBD MURNI	58.830.123.686,-	126.606.624,-	58.956.730.310,-
2.	APBD PERGESERAN	56.255.110.998,-	-	56.255.110.998,-
3.	APBD PERUBAHAN (APBD-P)	57.457.852.920,-	1.014.108.078,-	58.471.960.998,-

Berdasarkan APBD PERUBAHAN (APBD-P) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.57.457.852.920,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.014.108.078,-. Adapun rincian realisasi belanja menurut jenis belanja tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut.

Tabel 1.9. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

No.	JENIS BELANJA	BELANJA		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI	57.457.852.920,-	52.721.609.379,-	91,76
2.	BELANJA MODAL	1.014.108.078,-	1.011.669.355,-	99,76
JUMLAH BELANJA		58.471.960.998,-	53.733.278.734,-	91,90

1.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.3.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

No.	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan perencanaan dan pelaksanaan) masih kurang optimal dikarenakan Tugas dan fungsi yang terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga kurang terpadu antar bidang dalam perumusan kebijakan akibat masih adanya egosektoral dan kepentingan yang tidak sejalan.
2.	Penyelenggaraan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	1. Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, sementara lahan semakin berkurang. 2. Komoditi hortikultura memiliki sifat yang tidak tahan lama dalam penyimpanan tetapi memiliki resiko budidaya yang tinggi. 3. Daya saing komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang rendah. 4. Prasarana dan sarana pertanian yang belum menjamin aksesibilitas. 5. Kurangnya kesadaran petani dalam menggunakan benih bermutu.

		6. Kurangnya ketersediaan penyuluh di lapangan. 7. Kurangnya SDM kelembagaan petani. 8. Rendahnya ketersediaan bibit ternak berkualitas di masyarakat. 9. Kurangnya ketersediaan vaksin dan obat-obatan hewan ternak. 10. Tingginya resiko penularan penyakit hewan.
3.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas	Kurangnya keterampilan aparat, keterbatasan pelaksana teknis lapangan.

1.1.3.2. Visi Misi Kepala Daerah

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka **VISI** Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) **Misi** Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Adapun misi dari Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung Misi Gubernur yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu bagian 2 (dua) : ***Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.***

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

➤ **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan kerusakan komoditi akibat bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;

- m. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tujuan :**

Tujuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi untuk lima tahun kedepan (2025 – 2029) yaitu ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani***. Salah satu indikator pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesuai dengan Renstra 2025 - 2029 sebagai berikut :

➤ **Sasaran :**

Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan petani meliputi :

- a. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Meningkatnya populasi dan produksi komoditas peternakan

1.1.3.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program/Kegiatan APBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi juga telah melaksanakan program-program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, antara lain melalui : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier, (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (6) Program Perizinan Usaha Pertanian, (7) Program Penyuluhan Pertanian. Selengkapnya rincian program/kegiatan dana APBD tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11. Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2025.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan layanan administrasi umum perangkat daerah
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dipelihara
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota
1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di 11 kab/kota
2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu

3.	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu
4.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota
1.	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswastakmuditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan
2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Hewan dan Produk Hewan yang diawasi
3.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4.	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya
1.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak

Jika dilihat program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasarkan realisasi target dan keuangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.12. Realisasi Target dan Keuangan Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Indeks	78	78	38.513.603.083	34.276.129.381
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	9	461.285.797	415.253.900
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	Laporan	5	5	36.135.772.001	32.190.450.342
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan layanan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	7	7	136.203.288	110.021.838
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	4	4	1.291.982.620	1.187.084.720
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dipelihara	Unit	437	437	488.359.377	373.318.581
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	%	21	21	13.322.550.000	12.976.339.596
1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di 11 kab/kota	Kab/Kota	11	11	5.588.000.000	5.446.184.886
2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	Kab/Kota	11	11	942.000.000	852.474.981

3.	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu	Kab/Kota	11	11	1.078.000.000	1.075.517.400
4.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	Kab/Kota	11	11	5.714.550.000	5.602.162.329
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prsentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	%	17	17	4.245.033.414	4.192.848.008
1.	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Kab/Kota	11	11	4.245.033.414	4.192.848.008
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prsentase Meningkatnya keswan kmoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan kmoditas peternakan strategis di Prov. Jambi	%	10	10	1.265.609.001	1.198.327.984
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan	Kab/Kota	11	11	542.222.000	518.123.106
2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Hewan dan Produk Hewan yang diawasi	Kab/Kota	11	11	126.303.700	126.242.700

3.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Sampel	3000	3000	464.947.001	425.015.328
4	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	18	18	132.136.300	128.946.850
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	10	10	663.285.400	642.094.365
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalnya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab/Kota	11	11	663.285.400	642.094.365
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prsentase Kelembagaan Pertanian yang meningkt kapasitasnya	%	2	2	461.880.100	447.539.400
1.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	Kab/Kota	11	11	420.240.300	407.894.600
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak	Kab/Kota	11	11	41.639.800	39.644.800
TOTAL ANGGARAN APBD TAHUN 2025						58.471.960.998	53.733.278.734

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran; b) Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan. Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi hanya menampilkan IKK Keluaran dan IKK Hasil. Adapun pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) IKK Hasil (outcome) dan 3 (tiga) IKK Keluaran (output) sebagai pendukung dalam pencapaian IKK Hasil. IKK Hasil (outcome) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu (1) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, (2) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, dan (3) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

2.1.1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Untuk perhitungan peningkatan produksi tanaman pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memprioritaskan hanya 2 (dua) komoditi utama pangan prioritas yaitu padi dan jagung. Adapun perhitungan persentase peningkatan produksi tanaman pangan sebagai Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1. Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun } N - \text{produksi tanaman pangan tahun } N-1}{\text{Produksi tanaman pangan tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi dan luas panen hanya difokuskan pada pangan prioritas (padi dan jagung)
Padi	:	$\frac{367.791 - 281.022}{281.022} \times 100 = 30,87 \%$	Sumber : KSA BPS Prov. Jambi Tahun 2025
Jagung	:	$\frac{26.738 - 10.531}{10.531} \times 100 = 153,89 \%$	Sumber : KSA BPS Prov. Jambi Tahun 2025

2.1.1.1. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

➤ Padi

Pada tabel diatas, terlihat peningkatan tanaman padi sebesar 30,87%, peningkatan tersebut dikarenakan banyaknya alokasi dukungan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka untuk mencapai swasembada pangan. Adapun bantuan yang diberikan pada tahun ini yaitu berupa bantuan benih padi dari Pusat sebanyak 48.918 Ha dan untuk pengembangan kawasan Padi dana APBD sebanyak 880 Ha, bantuan alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sebanyak 102 unit dan bantuan pupuk bersubsidi sebanyak 42.945 Ton. Dukungan lainnya dalam

rangka meningkatkan produktivitas pertanian yaitu adanya optimasi lahan rawa sebesar 6.397 Ha, optimasi lahan non rawa 5.882 Ha, SID cetak sawah 5.100 Ha dan cetak sawah 1.500 Ha. Dukungan Pusat ini (APBN) bertujuan membangun infrastruktur jaringan irigasi yang diharapkan tersebar di seluruh wilayah.

➤ **Jagung**

Produksi jagung pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar 26.738 ton dan mengalami kenaikan sebesar 153,90%. Adanya bantuan benih jagung untuk 20,5 Ha (APBD) dan dukungan bantuan dari Pusat sebanyak 3.034 Ha sehingga mendorong perluasan areal tanam menjadikannya salah satu sentra produksi yang berkembang pesat.

Sedangkan IKK Keluaran (output) yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam upaya mendukung IKK Hasil (outcome) Persentase peningkatan produksi tanaman pangan terdapat 8 (delapan) keluaran dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan - Bantuan Benih Padi untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 880 Ha - Bantuan Benih Jagung untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 20,5 Ha - Penyaluran Pupuk Bersubsidi berupa Urea : 11.891,958 Ton, NPK : 30.733,768 Ton, dan Organik 319,040 Ton - Bantuan Alat dan Mesin Pertanian : 102 Unit - Optimasi Lahan Rawa : 6.397 Ha - Optimasi Lahan Non Rawa : 5.882 Ha - SID Cetak Sawah : 5.100 Ha - Cetak Sawah : 1.500 Ha	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan - Padi : 4.011,815 Ton - Kedelai : 2,4 Ton - Kacang Tanah : 5,1 Ton - Ubi Kayu : 90.003 Ton	Laporan dari UPTD BPSPT
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar - Tanaman pangan : 12 dokumen	Laporan dari UPTD BPSPT

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	4) Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Bantuan Benih Padi untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 100% - Bantuan Benih Jagung untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 100% - Optimasi Lahan Rawa : 100% - Optimasi Lahan Non Rawa : 100% - SID Cetak Sawah : 100% - Cetak Sawah : 100%	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi - Jumlah luas pengendalian OPT Tanaman Pangan dalam Provinsi : 3.362,33 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	6) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal Serangan OPT yang dikendalikan - Jumlah areal Tanaman Pangan yang terkendali : 2.754,97 Ha Jumlah Luas Bencana(Kebanjiran dan Kekeringan) dalam Provinsi - Jumlah areal terkena bencana Tanaman Pangan : 12.232,52 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	7) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Penyaluran Pupuk Bersubsidi berupa Urea : 100%, NPK : 100%, dan Organik : 100% - Bantuan Alat dan Mesin Pertanian : 100%	Laporan dari Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	8) Persentase fasilitasi pengendalian OPT	$\frac{\text{Jumlah area terkendali OPT}}{\text{Luas serangan OPT}} \times 100\%$ - $\frac{2.754,97}{3.273,71} \times 100\% = 84,15\%$ $\frac{\text{Jumlah area yang tertangani}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ - $\frac{1.538,75}{12.232,52} \times 100\% = 12,58\%$	Laporan dari UPTD BPTPH

2.1.1.2. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Ada 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dalam rangka mendukung persentase peningkatan produksi tanaman pangan :

- 1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan :
 - Pengembangan kawasan tanaman pangan dengan menyediakan benih padi sebanyak 17.500 kg (700 Ha) untuk Kota Jambi (200 Ha), kabupaten Tebo (200 Ha), Merangin (100 Ha), Kerinci (100 Ha), Sarolangun (100 Ha). Pengembangan kawasan padi ramah lingkungan kegiatan Bio-CF dengan menyediakan benih padi sebanyak 4.500 kg (180 Ha) untuk kota Sungai Penuh 50 Ha dan kabupaten Kerinci 130 Ha ;

- Pengembangan kawasan tanaman pangan dengan menyediakan benih jagung sebanyak 300 kg (20 Ha) untuk Kota Jambi dan 0,5 Ha untuk paket percontohan di KT. Konco Tani Desa Sungai Gelam Muaro Jambi;
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi berupa Urea : 11.891,958 Ton, NPK : 30.733,768 Ton, dan Organik 319,040 Ton diberikan untuk 11 kabupaten/kota;
- Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 102 unit (Cultivator 5 unit, Excavator 1 unit, Hand Sprayer 40 unit, Hidrotiller 3 unit, Pompa Air 8 unit, Power Thresher 16 unit, Rice Transplanter 1 unit, Traktor roda 2 rotary 4 unit, Traktor roda 2 singkal 14 unit, Traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan Dryer 6 unit) di 11 kab/kota;
- Optimasi lahan rawa dengan total 6.397 Ha dengan rincian Kab. Batanghari (948 Ha), Kerinci (800 Ha), Tanjab Barat (1.750 Ha), Tanjab Timur (1.330 Ha), Tebo (729), Bungo (326 Ha) dan Kota Sungai Penuh (514 Ha);
- Optimasi lahan non rawa dengan total 5.882 Ha dengan rincian Kab. Merangin (287 Ha), Sarolangun (982 Ha), Tanjab Barat (1.113 Ha), Muaro Jambi (300 Ha), Bungo (1.000 Ha), Kerinci (2.000 Ha) dan Kota Sungai Penuh (200 Ha);
- SID cetak sawah dengan total 2.500 Ha dengan rincian Kab. Batanghari (898 Ha), Kerinci (179 Ha), Sarolangun (726 Ha), Tanjab Barat (52,08 Ha), Tanjab Timur (187 Ha), Tebo (173), dan Bungo (261,97 Ha);
- Cetak sawah dengan total 1.500 Ha dengan rincian Kab. Batanghari (774,57 Ha), Sarolangun (443 Ha) dan Bungo (261,96 Ha).

2. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan.

Tujuan output ini adalah untuk menjamin benih memenuhi standar mutu fisik, genetik, fisiologis dan kesehatan (patologis) serta memastikan benih yang beredar memenuhi standar kualitas tanaman

pangan. Berdasarkan laporan dari UPTD BPSPT terdapat 4 penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan yaitu : (1) Padi : 4.110,815 ton, (2) Kedelai : 2,4 Ton, (3) Kacang Tanah : 5,1 Ton, dan (4) Ubi Kayu : 90.003 Ton (laporan terlampir).

3. Dokumen pengawasan benih yang beredar.

Adapun dokumen untuk tanaman pangan sebanyak 12 dokumen (laporan terlampir).

4. Prasarana pertanian yang digunakan.

Ada 6 (enam) prasarana yang tersedia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu (1) Bantuan Benih Padi untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, (2) Bantuan Benih Jagung untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, (3) Optimasi Lahan Rawa, (4) Optimasi Lahan Non Rawa, (5) SID Cetak Sawah, dan (6) Cetak Sawah. Semua penggunaan prasarana ini telah digunakan 100% dan bermanfaat bagi petani.

5. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman.

Adapun laporan dari UPTD BPTPH menjelaskan bahwa jumlah luas pengendalian yaitu 3.362,33 Ha dengan komoditi padi 3.046,89 Ha, Jagung 303,89 Ha, Kedelai 2,5 Ha dan Kacang Tanah 9,05 Ha (laporan terlampir)

6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana.

Adapun laporan dari UPTD BPTPH menjelaskan dari luas pengendalian sebesar 3.362,33 Ha, areal tanaman pangan yang terkendali seluas 2.754,97 Ha dengan komoditi padi 2.576,14 Ha, Jagung 169,45 Ha, Kedelai 0,5 Ha dan Kacang Tanah 8,88 Ha (laporan terlampir).

Sedangkan luas bencana (kebanjiran dan kekeringan) untuk tanaman pangan yaitu seluas 12.232,52 Ha dengan komoditi padi 12.192,02 Ha dan Jagung 40,5 Ha.

7. Persentase sarana pertanian yang digunakan.

Ada 2 (dua) sarana yang tersedia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu (1) penyaluran pupuk bersubsidi dan (2) bantuan alat dan mesin pertanian. Semua penggunaan sarana ini telah digunakan 100% dan bermanfaat bagi petani.

8. Persentase fasilitasi pengendalian OPT.

Adapun untuk fasilitasi pengendalian OPT tanaman pangan dengan jumlah area terkendali 2.754,97 Ha dibagi luas serangan OPT 3.273,71 Ha dikali 100 didapat angka 84,15%. Upaya yang dilakukan yaitu kerja keras dari petugas OPT dan petugas penyuluh dilapangan dalam mengamankan pertanaman dari gangguan OPT dan bencana lainnya.

Sedangkan untuk fasilitasi penanggulangan bencana tanaman pangan dengan jumlah area yang ditangani 1.538,75 Ha dibagi luas area terkena bencana 12.232,52 Ha dikali 100 didapat angka 12,58%. Pencapaian ini sangat kecil karena sangat kesulitan dalam penanganan banjir, ini dikarenakan daerah Jambi merupakan daerah aliran sungai (DAS) sehingga apabila debit air tinggi, maka aliran sungai akan meluap dan menyebar kedaerah sekitarnya.

2.1.2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Untuk perhitungan peningkatan produksi hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memprioritaskan hanya 2 (dua) komoditi unggulan utama yaitu cabe merah dan bawang merah. Adapun perhitungan persentase peningkatan produksi tanaman pangan sebagai IKK Hasil (outcome) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi hortikultura dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi tanaman hortikultura tahun } N - \text{produksi tanaman hortikultura tahun } N-1}{\text{Produksi tanaman hortikultura tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi hanya difokuskan pada komoditi utama (cabe merah dan bawang merah)
Cabe Merah	:	$\frac{214.628,8 - 171.457,1}{171.457,1} \times 100 = 25,18 \%$	Sumber : BPS Prov. Jambi Tahun 2025
Bawang Merah	:	$\frac{21.855,9 - 12.287,7}{12.287,7} \times 100 = 77,87 \%$	Sumber : BPS Prov. Jambi Tahun 2025

2.1.2.1. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura.

➤ Cabe Merah

Di tahun 2025 indikator ini telah terealisasi sebesar 214.628,8 Ton dan mengalami peningkatan realisasi sebesar 25,18%. Terjadinya peningkatan produksi komoditas cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program pemerintah daerah dengan memberikan bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan Benih Cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim dalam rangka mewujudkan Percontohan Lahan Pangan Mandiri Terpadu di Kelompok Tani Konco Tani Desa Sungai

Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah dan rawit sehingga menjaga kestabilan harga cabe di pasaran.

➤ **Bawang Merah**

Di tahun 2025 indikator ini terealisasi sebesar 21.855,9 Ton dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 77,87%.

Pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pengembangan kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah pada Percontohan Lahan Pangan Mandiri Terpadu di Kelompok Tani Konco Tani Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Sedangkan IKK Keluaran (output) yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam upaya mendukung IKK Hasil (outcome) persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura terdapat 8 (delapan) keluaran dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4. IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan : - Bantuan Benih Cabe Merah untuk pengembangan kawasan cabe merah : 25 Ha - Bantuan Bawang Merah untuk pengembangan kawasan bawang merah : 2 Ha - Bantuan Benih Cabe Merah 1 sachet untuk paket percontohan cabe merah : 1 Ha - Bantuan Benih Cabe Rawit 1 sachet untuk paket percontohan cabe rawit : 0,5 Ha - Bantuan Bawang Merah untuk paket percontohan bawang merah : 1 Ha - Bantuan sayur-sayuran seperti benih kacang panjang 1 sachet, benih semangka 2 sachet dan terong 1 sachet : 2 Ha - Bantuan Bibit Buah-buahan Alpukat 300 batang, Durian 250 batang untuk pengembangan kawasan buah-buahan - Bantuan Benih kentang G2 untuk pengembangan kawasan kentang : 5 Ha - Bantuan benih Semangka untuk pengembangan kawasan semangka : 2 Ha - Bantuan motor roda tiga untuk pasca panen hortikultura : 2 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	2) Jumlah penerbitan sertifikat dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikat dan pengawasan benih tanaman - Kentang : 156.000 knol (78.800 kg) - Buah : 12.002 Batang - Bawang Merah : 350 Kg - Cabe Merah : 2.000 Kg	Laporan dari UPTD BPSP
	3) Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar - Tanaman hortikultura : 12 dokumen	Laporan dari UPTD BPSP
	4) Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Bantuan Benih Cabe Merah untuk pengembangan kawasan cabe merah : 100% - Bantuan Bawang Merah untuk pengembangan kawasan bawang merah : 100% - Bantuan Benih Cabe Merah 1 sachet untuk paket percontohan cabe merah : 100% - Bantuan Benih Cabe Rawit 1 sachet untuk paket percontohan cabe rawit : 100% - Bantuan Bawang Merah untuk paket percontohan bawang merah : 100% - Bantuan sayur-sayuran seperti benih kacang panjang 1 sachet, benih semangka 2 sachet dan terong 1 sachet : 100% - Bantuan Bibit Buah-buahan Alpukat 300 batang, Durian 250 batang untuk pengembangan kawasan buah-buahan : 100% - Bantuan Benih kentang G2 untuk pengembangan kawasan kentang : 100% - Bantuan benih Semangka untuk pengembangan kawasan semangka : 100% - Bantuan motor roda tiga untuk pasca panen hortikultura : 100%	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi - Jumlah luas pengendalian OPT Tanaman Hortikultura dalam Provinsi : 357,91 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	6) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal Serangan OPT yang dikendalikan - Jumlah areal Tanaman Hortikultura yang terkendali : 73,29 Ha Jumlah Luas Bencana(Kebanjiran dan Kekeringan) dalam Provinsi - Jumlah areal terkena bencana Tanaman Hortikultura : 0 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH Laporan dari UPTD BPTPH (Tidak ada laporan)
	7) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ - 0%	
	8) Persentase fasilitasi pengendalian OPT - Komoditi Tanaman Hortikultura Persentase fasilitasi penanggulangan bencana - Komoditi Tanaman Hortikultura	$\frac{\text{Jumlah area terkendali OPT}}{\text{Luas serangan OPT}} \times 100\%$ - $\frac{73,29}{135,52} \times 100\% = 54,08\%$ $\frac{\text{Jumlah area yang tertangani}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ - $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Laporan dari UPTD BPTPH Tidak ada laporan dikarenakan telah dilakukan pemanenan lebih awal

2.1.2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura.

Ada 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dalam rangka mendukung persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura :

- 1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.
 - Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha dengan rincian Kab. Muaro Jambi (2 Ha), Batanghari (2 Ha), Tanjab Barat (2 Ha), Tanjab Timur (2 Ha), Tebo (2 Ha), Bungo (2 Ha), Sarolangun (2 Ha), Merangin (5 Ha), Kerinci (2 Ha), Kota Jambi (2 Ha) dan Kota Sungai Penuh (2 Ha);
 - Bantuan bawang merah untuk pengembangan kawasan bawang merah sebanyak 2 Ha dengan rincian Kota Jambi (1 Ha) dan Kab. Merangin (1 Ha);
 - Bantuan benih cabe merah 1 sachet untuk paket percontohan cabe merah 1 Ha di Kab. Muaro Jambi;
 - Bantuan benih cabe rawit 1 sachet untuk paket percontohan cabe rawit 0,5 Ha di Kab. Muaro Jambi;
 - Bantuan bawang merah untuk paket percontohan bawang merah 1 Ha di Kab. Muaro Jambi;
 - Bantuan sayur-sayuran seperti benih kacang panjang 1 sachet, benih dan terong 1 sachet 2 Ha di Kab. Muaro Jambi;
 - Bantuan bibit buah-buahan Alpukat 300 batang dan durian untuk pengembangan kawasan buah-buahan di Kab. Muaro Jambi;
 - Bantuan benih kentang G2 untuk pengembangan kawasan kentang 5 Ha di Kab. Kerinci;
 - Bantuan benih semangka untuk pengembangan kawasan semangka 2 Ha di Kab. Tanjab Timur;
 - Bantuan motor roda tiga untuk pasca panen hortikultura 2 unit untuk Kab. Tanjab Barat dan Muaro Jambi;

9. Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura.

Tujuan output ini adalah untuk menjamin benih memenuhi standar mutu fisik, genetik, fisiologis dan kesehatan (patologis) serta memastikan benih yang beredar memenuhi standar kualitas tanaman hortikultura. Berdasarkan laporan dari UPTD BPSPT terdapat 4 penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan yaitu : (1) Kentang 156.000 knol (78.800 kg), (2) Buah : 12.002 Batang, (3) Bawang Merah 350 kg, dan (4) Cabe Merah : 2.000 kg (laporan terlampir).

10. Dokumen pengawasan benih yang beredar.

Adapun dokumen untuk tanaman hortikultura sebanyak 12 dokumen (laporan terlampir).

11. Prasarana pertanian yang digunakan.

Ada 10 (sepuluh) prasarana yang tersedia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan semua penggunaan prasarana ini telah digunakan 100% dan bermanfaat bagi petani.

12. Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman.

Adapun laporan dari UPTD BPTPH menjelaskan bahwa jumlah luas pengendalian yaitu 357,91 Ha dengan komoditi cabe merah 312,15 Ha, bawang merah 30,7 Ha, dan kentang 15,06 Ha (laporan terlampir)

13. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana.

Adapun laporan dari UPTD BPTPH menjelaskan dari luas pengendalian sebesar 357,91 Ha, areal tanaman hortikultura yang terkendali seluas 73,29 Ha dengan komoditi cabe merah 63,71 Ha, bawang merah 6,59 Ha, dan kentang 2,99 Ha (laporan terlampir). Sedangkan luas bencana

(kebanjiran dan kekeringan) untuk tanaman hortikultura yaitu 0 Ha karena tidak ada laporan.

14. Persentase sarana pertanian yang digunakan.

Adapun sarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi untuk komoditi hortikultura pada tahun 2025 tidak ada.

15. Persentase fasilitasi pengendalian OPT.

Adapun untuk fasilitasi pengendalian OPT tanaman pangan dengan jumlah area terkendali 73,29 Ha dibagi luas serangan OPT 135,52 Ha dikali 100 didapat angka 54,08%. Upaya yang dilakukan yaitu kerja keras dari petugas OPT dan petugas penyuluh dilapangan dalam mengamankan pertanaman dari gangguan OPT dan bencana lainnya.

Sedangkan untuk fasilitasi penanggulangan bencana tanaman tidak ada laporan dikarenakan telah dilakukan pemanenan lebih awal.

2.1.3. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

Untuk perhitungan peningkatan produksi peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memprioritaskan 4 (empat) komoditi unggulan utama yaitu daging sapi, daging kambing, daging ayam dan telur. Adapun perhitungan persentase peningkatan produksi tanaman pangan sebagai IKK Hasil (outcome) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5. Tabel Perhitungan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan sebagai IKK Hasil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi peternakan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N - \text{produksi komoditas peternakan tahun } N-1}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi hanya difokuskan pada komoditi utama (daging sapi, daging kambing, daging ayam dan telur)
Daging Sapi	:	$\frac{5.444 - 4.524}{4.524} \times 100 = 20,33 \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Daging Kambing	:	$\frac{434 - 468}{468} \times 100 = -7,26 \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Daging Ayam	:	$\frac{64.323 - 58.581}{58.581} \times 100 = 9,80\%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Telur Ayam	:	$\frac{41.692 - 39.114}{39.114} \times 100 = 6,59\%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)

2.1.3.1. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

➤ *Daging Sapi*

Untuk penghitungan produksi daging sapi yaitu berupa daging dan bagian yang dapat dimakan (karkas, jeroan dan daging variasi). Adapun produksi daging sapi tahun 2025 yaitu sebesar 5.444 ton dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 20,33%. Pencapaian ini secara umum dikarenakan minat masyarakat sudah mulai banyak mengkonsumsi daging sapi/kerbau dilihat dari kenaikan jumlah pemotongan secara reguler maupun qurban, pada tahun 2025

pemotongan qurban ternak sapi sebanyak 13.158 ekor dibandingkan tahun 2024 10.132 ekor (naik 29,86%). Selain minat masyarakat meningkat, dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mengembangkan peternakan sapi berupa bantuan ternak ke peternak sebanyak 245 ekor dan pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten/Kota.

➤ **Daging Kambing**

Untuk penghitungan produksi daging kambing sama seperti produksi daging sapi. Di tahun 2025, produksi daging kambing terealisasi sebesar 434 ton dan persentase realisasi capaian sebesar -7,26%.

Penurunan angka produksi daging kambing secara umum yaitu tidak adanya jaminan stabilnya harga ternak kambing membuat peternak kurang bersemangat untuk memproduksi daging dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi terhadap kualitas ternak kambing. Tahun 2025 terjadi penurunan bobot badan rata-rata sehingga mempengaruhi dalam penghitungan produksi daging kambing, jika dilihat dari jumlah pemotongan ternak kambing sebagai angka penentu dalam penghitungan produksi daging dilihat mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 22.753 ekor jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 22.698 ekor (naik 0,24%). Dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mengembangkan peternakan kambing berupa bantuan ternak ke peternak sebanyak 301 ekor.

➤ **Daging Ayam**

Di tahun 2025, produksi daging ayam ini telah terealisasi sebesar 64.323 ton dan mengalami peningkatan pencapaian sebesar 9,80%.

Peningkatan ini didorong oleh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilitas pasokan dan pengembangan peternakan untuk menjaga keseimbangan harga.

➤ **Telur**

Di tahun 2025, produksi telur ayam ini telah terealisasi sebesar 41.692 ton dan mengalami peningkatan persentase realisasi capaian sebesar 6,59%.

Peningkatan ini sama seperti peningkatan daging ayam karena daging ayam dan telur merupakan sumber protein hewani utama dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) karena bergizi tinggi dan mudah diolah.

Sedangkan IKK Keluaran (output) yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam upaya mendukung IKK Hasil (outcome) persentase peningkatan produksi peternakan terdapat 11 (sebelas) keluaran dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.6. IKK Keluaran (output) Dalam Mendukung Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025.

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1) Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diberikan : - Bantuan Ternak Sapi sebanyak 245 ekor, pakan ternak 32.950 kg dan obat-obatan 35 paket - Bantuan Ternak Kambing sebanyak 301 ekor, pakan ternak 12.500 kg dan obat-obatan 15 paket - Bantuan Ternak Ayam sebanyak 370 ekor, pakan ternak 2.000 kg, obat-obatan 3 paket dan material kandang 3 paket - Bantuan Ternak Itik sebanyak 600 ekor, pakan ternak 3.000 kg, obat-obatan 4 paket dan obat-obatan 4 paket - Bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik yaitu Mesin Grinder Kompos 4 unit, hand sprayer 4 buah, karung jaring - Bantuan pemberian rumput untuk peningkatan kualitas hiauan pakan ternak yaitu odot 5.000 stek dan rumput indigofera 400 batang - Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies 8.000 dosis, Jembrana 4.000 dosis dan SE 4.000 dosis - Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota : 1 tahun - Promosi produk peternakan dengan memberikan kompensasi daging ayam 10 kg, daging sapi 10 kg, telur 58 kg dan madu 19 botol	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi Laporan dari UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan dan Bidang Keswan dan Kesmavet Laporan Bidang Peternakan
	2) Jumlah penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan	Jumlah penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan di Kabupaten/Kota - Rekomendasi lalu lintas Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 1.432 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 435 dokumen - Rekomendasi Lalu Lintas Produk Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 4.489 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 443 dokumen	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	3) Dokumen pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan	Jumlah dokumen Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan • Dokumen lalu lintas : 12 dokumen	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	4) Prasarana peternakan yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ • Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota : 100%	Laporan dari UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan dan Bidang Keswan dan Kesmavet
	5) Wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis di Kabupaten/Kota • Jumlah kecamatan yang terkendali penyakit hewan menular strategis : 129 kecamatan	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	6) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis di Kabupaten/Kota • Rabies : 3 ekor • Jembrana : 129 ekor • SE : 57 ekor • LSD : 1 ekor • BEF : 1 ekor • Pneumonia : 8 ekor	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	7) Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah fasilitas penerbitan izin usaha peternakan : 4 unit usaha bersertifikat NKV	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	8) Persentase sarana peternakan yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ • Bantuan Ternak Sapi, pakan ternak dan obat-obatan : 100% • Bantuan Ternak Kambing, pakan ternak dan obat-obatan : 100% • Bantuan Ternak Ayam, pakan ternak, obat-obatan dan material kandang : 100% • Bantuan Ternak Itik, pakan ternak, obat-obatan dan obat-obatan : 100% • Bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik yaitu Mesin Grinder, hand sprayer, karung jaring dan krisbow sekop : 100% • Bantuan pemberian rumput untuk peningkatan kualitas hiauan pakan ternak yaitu odot dan rumput indigofera : 100% • Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies, Jembrana dan SE : 100% • Promosi produk peternakan dengan memberikan kompensasi daging ayam, daging sapi, telur dan madu : 100%	Laporan dari Bidang Peternakan; Bidang Keswan dan Kesmavet
	9) Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	$\frac{\text{Luas Wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$ • $\frac{129}{144} \times 100\% = 89,58\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	10) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun berjalan}}{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya} (t-1)} \times 100\%$ • $\frac{392 - 199}{392} \times 100\% = 49,23\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	11) Persentase jumlah penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha yang di Audit/Surveilans}}{\text{Jumlah Unit Usaha yang Mendaftar di Aplikasi OSS}} \times 100\%$ • $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet

Keterangan : OSS adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan penerbitan sertifikat NKV

2.1.3.2. Penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

Ada 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dalam rangka mendukung persentase peningkatan produksi peternakan :

- 1) Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.
 - Bantuan Ternak Sapi sebanyak 245 ekor, pakan ternak 32.950 kg dan obat-obatan 35 paket untuk 7 kabupaten (Tanjung Barat 18 ekor, Muaro Jambi 7 ekor, Merangin 6 ekor, Kerinci 36 ekor, Tebo 132 ekor, Batanghari 40 ekor dan Bungo 6 ekor);
 - Bantuan Ternak Kambing sebanyak 301 ekor, pakan ternak 12.500 kg dan obat-obatan 15 paket untuk 9 kabupaten (Merangin 40 ekor, Sarolangun 34 ekor, Bungo 34 ekor, Tebo 91 ekor, Tanjung Barat 17 ekor, Tanjung Timur 17 ekor, Kerinci 17 ekor, Muaro Jambi 23 ekor, dan Batanghari 28 ekor);
 - Bantuan Ternak Ayam sebanyak 370 ekor, pakan ternak 2.000 kg, obat-obatan 3 paket dan material kandang 3 paket untuk kabupaten Muaro Jambi;
 - Bantuan Ternak Itik sebanyak 600 ekor, pakan ternak 3.000 kg, obat-obatan 4 paket dan obat-obatan 4 paket untuk 2 kabupaten (Muaro Jambi 350 ekor dan Merangin 250 ekor);
 - Bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik yaitu Mesin Grinder Kompos 4 unit, hand sprayer 4 buah, karung jaring 116 lembar dan krisbow sekop 8 buah untuk 3 kabupaten (Batanghari 2 kelompok ternak, Bungo 1 kelompok ternak dan Sarolangun 1 kelompok ternak);
 - Bantuan pemberian rumput untuk peningkatan kualitas hijauan pakan ternak yaitu odot 5.000 stek dan rumput indigofera 400 batang untuk 3 kabupaten (Batanghari 2 kelompok ternak, Bungo 1 kelompok ternak dan Sarolangun 1 kelompok ternak);

- Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies 8.000 dosis, Jembrana 4.000 dosis dan SE 4.000 dosis untuk 11 kabupaten/kota;
- Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota
- Promosi produk peternakan dengan memberikan kompensasi daging ayam 10 kg, daging sapi 10 kg, telur 58 kg dan madu 19 botol pada saat pameran ataupun bazar di Provinsi.

2) Jumlah penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan, keamanan pangan dan ketertiban lalu lintas ternak antar wilayah. Berdasarkan laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet terdapat 2 rekomendasi dalam pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan yaitu (1) Rekomendasi lalu lintas Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 1.432 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 435 dokumen, dan (2) Rekomendasi Lalu Lintas Produk Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 4.489 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 443 dokumen

3) Dokumen pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.

Adapun dokumen lalu lintas hewan dan produk hewan sebanyak 12 dokumen (laporan terlampir).

4) Prasarana peternakan yang digunakan.

Prasarana yang difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas yang ada di 11 Kabupaten/Kota;

5) Wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis.

Adapun laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet yaitu Jumlah kecamatan yang terkendali penyakit hewan menular strategis : 129 kecamatan dari total kecamatan sebanyak 144 di Provinsi Jambi.

6) Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis.

Adapun laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet yaitu kasus penyakit hewan menular strategis yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu : Rabies 3 ekor, Jembrana 129 ekor, SE 57 ekor, LSD 1 ekor, BEF 1 ekor dan Pnemonia 8 ekor.

7) Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Adapun jumlah fasilitasi NKV untuk tahun ini yaitu 4 unit usaha yang telah bersertifikat NKV

8) Persentase sarana peternakan yang digunakan.

Adapun sarana yang telah diberikan sebanyak 9 (sembilan) sarana, semua nya digunakan 100% dan bermanfaat untuk kelompok ternak atau masyarakat umum.

9) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

Berdasarkan laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet yaitu ada 129 kecamatan yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah kecamatan di Provinsi Jambi sebanyak 144 kecamatan sehingga didapat angka 89,58%. Dukungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu dengan pelayanan kesehatan hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi serta Puskesmas dan sinergi petugas kesehatan hewan yang ada di 11 Kabupaten/Kota;

10) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

Persentase penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular dilihat dari jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular tahun 2025 sebanyak 199 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 392 kasus sehingga didapat angka 49,23% dalam artian bahwa terjadi penurunan kasus penyakit yaitu sebesar 50,77% ($100\% - 49,23\%$). Dukungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui Bidang Keswan dan kesmavet yaitu penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies 8.000 dosis, Jembrana 4.000 dosis dan SE 4.000 dosis.

11) Persentase jumlah penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Dalam melayani penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), unit usaha diwajibkan melakukan pendaftaran di Aplikasi OSS (aplikasi yang digunakan untuk pengajuan penerbitan sertifikat NKV) sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui Bidang Keswan dan Kesmavet bisa melakukan audit/surveilans dan unit usaha tersebut dapat memenuhi persyaratan dalam penerbitan sertifikat NKV.

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik..

2.2.1. Target dan Capaian Realisasi Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan sasaran 1 yaitu Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Secara Berkelanjutan dengan mengukur Nilai Tukar Petani (NTP). Pencapaian NTP dengan melihat NTP pada sub sektornya yaitu Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), dan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT). Adapun realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7. Capaian NTP berdasarkan sub sektor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

Sasaran	Indikator	2024	2025	% Capaian Peningkatan
Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Secara Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) (%)	105,10	107,13	1,93
	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) (%)	130,20	140,61	8,00
	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)	93,12	94,97	1,99

Keterangan :
Data Realisasi Bulan Desember 2025
Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan sasaran 2 untuk menentukan penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta meningkatnya populasi dan produksi komoditas peternakan. Tabel Indikator Kinerja Daerah adalah tabel yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Indikator Kinerja pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja PD	Satuan	Capaian 2025		
			Tahun 2024	Realisasi 2025	% Capaian Peningkatan
1	Jumlah Produksi Padi	Ton GKG	281.022	367.791	30,88
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	10.531	26.738	153,90
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.714.571	2.146.288	25,18
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	122.877	218.559	77,87
5	Populasi Sapi	Ekor	112.906	114.060	1,02
6	Populasi Kambing	Ekor	119.766	125.248	4,58
7	Produksi Daging Sapi	Ton	4.524	5.444	20,33
8	Produksi Daging Kambing	Ton	468	434	-7,26
9	Produksi Daging Ayam	Ton	58.581	64.323	9,80
10	Produksi Telur	Ton	39.114	41.692	6,59

Keterangan :

1. 2024 Angka Tetap
2. Produksi Padi 2025 : ATAP KSA 2025
3. Produksi Jagung 2025 : ATAP KSA 2025
4. Produksi Cabe Merah : ASEM 2025
5. Produksi Bawang Merah 2025 : ASEM 2025
6. Populasi Ternak (Sapi dan Kambing) : ASEM 2025 Ditjen Peternakan dan Keswan Kementan RI
7. Produksi Daging (Sapi, Kambing, Ayam) dan Telur : ASEM 2025 Ditjen Peternakan dan Keswan Kementan RI

2.2.2. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah melaksanakan program-program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, antara lain melalui 6 (enam) Program antara lain : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan (6) Program Penyuluhan Pertanian. Selengkapnya rincian program/kegiatan dana APBD tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Dana APBD yang dikelola Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

No	Program / Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Persentase (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.513.603.083	34.276.129.381	89,00
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.322.550.000	12.976.339.596	97,40
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.245.033.414	4.192.848.008	98,77
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.265.609.001	1.198.327.984	94,68
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	663.285.400	642.094.365	96,81
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	461.880.100	447.539.400	96,90
JUMLAH		58.471.960.998	53.733.278.734	91,90

Dalam mewujudkan pembangunan urusan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi didukung anggaran APBD dengan jumlah Rp. 58.471.960.998,- untuk melaksanakan 7 (tujuh) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 38.513.603.083,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.276.129.381,- (89,00%). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program rutin yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kelancaran operasional dinas selama tahun berjalan. Program ini memiliki 5 (lima) Kegiatan yang terdiri atas (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5) Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada setiap kegiatan, dengan 5 (lima) indikator kinerja yang tercapai sesuai dengan target kinerja (97%). Adapun tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya pegawai yang pensiun/meninggal/pindah tugas sebanyak 12 orang, adanya kekosongan jabatan (5 eselon IV) sehingga anggaran yang disiapkan tidak terealisasi serta ada Tabungan Perumahan Rakyat yang dianggarkan namun masih menunggu pedoman dari pusat.

Upaya yang dilakukan pada program (indikator utama) ini adalah Predikat AKIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan indikator sebagai berikut (1) Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran, (3) Jumlah laporan Akuntansi dan keuangan, (3) Jumlah laporan kegiatan rutinitas kantor, (4) Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan, dan (5) Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Manfaat program ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Adapun rincian capaian kinerja program ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Indeks	78	78	38.513.603.083	34.276.129.381
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	9	461.285.797	415.253.900
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	Laporan	5	5	36.135.772.001	32.190.450.342
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan layanan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	7	7	136.203.288	110.021.838
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	4	4	1.291.982.620	1.187.084.720
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dipelihara	Unit	437	437	488.359.377	373.318.581

Adapun output dari program ini yaitu sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran berupa laporan LKj, LKPj, LPPD, Dokumen RKA/DPA APBD SKPD TA.2025, Dokumen RKA/DPA APBD Pergeseran SKPD TA.2025, RKA/DPA APBD-P SKPD TA.2025 dan Renstra;
- Pertemuan Evaluasi Kegiatan BIO-CF Triwulanan (Trw I s/d IV) sebanyak 100 orang dan Rapat biasa sebanyak 240 orang;

- c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan berupa pembayaran honor-honor pengelola keuangan;
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- f. Penyelenggaraan perjalanan dan konsultasi SKPD;
- g. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- h. Penyediaan bahan bakar dan pelumas, cetak baliho, karangan bunga, alat/bahan untuk kegiatan kantor, belanja makan minum rapat, alat rumah tangga pembersih dan rumah tangga lainnya (Home Use), publikasi media elektronik dan pemeliharaan AC;
- i. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian berupa pembinaan kepegawaian;
- j. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- k. Rehabilitasi kantor Dinas DTPHP.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 13.322.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.976.339.596,- (97,40%). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) kegiatan yang terdiri atas (1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, (2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, (3) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dan (4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan di kabupaten kota, dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang tercapai sesuai dengan target kinerja (100%) dan terealisasi 98,93%. Adapun tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya surat dari Gubernur Jambi Nomor: 005/2470/Bappeda-4.1/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Hal Kepastian

Perpanjangan Tahun 2026 dan Luncuran Pendanaan Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 Terkait Penerusan Hibah On-Granting Program BioCF ASFL Provinsi Jambi, isi surat menjelaskan adanya keterbatasan anggaran/defisit Pemerintah Provinsi Jambi sehingga untuk kegiatan BioCF dihentikan dan hanya bisa direalisasikan sampai bulan Oktober 2025.

Upaya yang dilakukan pada program ini adalah (1) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan koordinasi, sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian, (2) Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu, (3) Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu di Kab/Kota, (4) Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

Manfaat program ini adalah meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan serta meningkatkan populasi ternak.

Adapun rincian capaian kinerja program ini terlihat tabel berikut :

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	%	21	21	13.322.550.000	12.976.339.596
1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di 11 kab/kota	Kab/Kota	11	11	5.588.000.000	5.446.184.886
2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	Kab/Kota	11	11	942.000.000	852.474.981

3.	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu	Kab/Kota	11	11	1.078.000.000	1.075.517.400
4.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas	Kab/Kota	11	11	5.714.550.000	5.602.162.329

Output dari program ini sebagai berikut :

- Adanya Bimtek Pembuatan Bio Pestisida Kegiatan Bio CF sebanyak 30 orang di kelompok tani Harapan Baru Desa Siulak Kecil Kec. Siulak Kabupaten Kerinci, Bimtek Pemanfaatan Alsintan sebanyak 30 orang di kabupaten Tebo dan Kerinci, Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 102 unit (Cultivator 5 unit, Excavator 1 unit, Hand Sprayer 40 unit, Hidrotiller 3 unit, Pompa Air 8 unit, Power Thresher 16 unit, Rice Transplanter 1 unit, Traktor roda 2 rotary 4 unit, Traktor roda 2 singkal 14 unit, Traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan Dryer 6 unit) di 11 kab/kota;
- Pendampingan/pembinaan dan Monev Kegiatan Air dalam rangka pengawasan peredaran sarana pertanian;
- Standarisasi Laboratorium Benih UPTD BPSPT Provinsi Jambi;
- Penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan dengan penyediaan benih tanaman pangan di Balai Benih Induk (BBI) sebagai sumber bagi Balai Benih Utama (BBU) dan petani penangkar yang ada di Provinsi Jambi, di UPTD Perbenihan menyediakan perbanyakan benih sumber padi 40 Kg (1,50 Ha) di BBI Padi Lubuk Ruso, benih kacang tanah 120 Kg (1 Ha) dan benih kedelai 20 Kg (0,5 Ha) di BBI Palawija Sebapo;
- Pengembangan tanaman hias pada Satker Taman Anggrek, penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura dengan penyediaan bibit buah-

buahan di Kebun Benih Induk (KBI) Hortikultura Sungai Tiga berupa alpukat 20 batang, bibit duku 600 batang dan bibit durian 750 batang di UPTD Perbenihan dalam rangka untuk perbanyak dan stok bibit benih hortikultura;

- f. Mendukung kegiatan pameran/bazar/pasar tani dengan menyediakan kompensasi pembelian produk segar dan olahan seperti daging ayam 10 Kg, daging sapi 10 Kg, telur 58 Kg dan madu 19 botol, rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 42 orang dengan mengundang Petugas/Tim Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Kabupaten/Kota dan Pembina PPHP Kabupaten/Kota;
- g. Pemeliharaan dan perawatan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak sebanyak 41 ekor, pengembangan dan pengelolaan lahan hijau pakan ternak 10 Ha dengan pembelian bibit rumput unggul odot sebanyak 20.000 stek, pengembangan Laboratorium IB dengan memproduksi semen beku sebanyak 600 dosis, pengembangan Sapi Bull untuk dijadikan sapi pejantan unggul sebanyak 3 ekor (sapi Simental), pembelian ternak sapi Bali sebanyak 3 ekor untuk dikembangkan di UPTD Balai Pembibitan Ternak;
- h. Pengadaan ternak dalam rangka meningkatkan populasi ternak yaitu sapi 245 ekor, kambing 301 ekor, Ayam 370 ekor dan itik 600 ekor serta paket pakan ternak 50.450 Kg, obat-obatan ternak 58 paket dan material kandang sebanyak 7 paket, selain itu ada Bimtek untuk penerima bantuan ternak tersebut dengan jumlah petani/ternak 56 orang;
- i. Adanya bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik dari kegiatan Bio CF seperti Mesin Grinder Kompos (kotoran ternak)-APPO sebanyak 4 unit, hand sprayer 4 buah, karung jaring 116.312 lembar, krisbow sekop 8 buah, rumput odot 5.000 stek, rumput indigofera 400 batang dengan penerima manfaat 4 kelompok tani di kabupaten Batanghari 2 kelompok dan kabupaten Bungo dan Sarolangun masing-masing 1 kelompok.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 4.245.033.414,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.192.848.008,- (98,77%). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penataan Prasarana Pertanian. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan di kabupaten/kota yang tercapai sesuai dengan target kinerja (100%) dan terealisasi 100%.

Upaya yang dilakukan pada program ini adalah (1) Tersedianya penataan prasarana pertanian untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura strategis.

Manfaat program ini adalah meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Adapun rincian capaian kinerja program ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	%	17	17	4.245.033.414	4.192.848.008
1.	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Kab/Kota	11	11	4.245.033.414	4.192.848.008

Output dari program ini sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pasar Tani kegiatan Bio-CF dengan output 20 orang di kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Barat, Sosialisasi dan Bimtek Hortikultura sebanyak 25 orang di kabupaten Muaro Jambi, Promosi Dalam Daerah 15 orang di Kota Jambi, Rakor percepatan pelaksanaan kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2025 sebanyak 90 orang di Aula Dinas TPHP Provinsi Jambi pembahasan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025 dan Bimtek Budidaya Padi Ramah Lingkungan kegiatan Bio-CF dengan output sebanyak 60 orang di Kota Sungai Penuh dan Kerinci dan Bimtek pasca panen kegiatan Bio-CF sebanyak dengan output 30 orang di kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Barat;
- b. Penyediaan bibit Alpokat 300 batang, Durian 250 batang untuk kabupaten Muaro Jambi;
- c. Pengadaan motor roda 3 sebanyak 2 unit untuk kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Barat;
- d. Paket percontohan bawang merah dengan menyediakan benih bawang merah sebanyak 200 Kg (1 Ha), percontohan cabe merah dengan menyediakan benih cabe merah sebanyak 1 sachet (0,25 Ha), Paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim dengan menyediakan cabe rawit 1 sachet, benih jagung 3 sachet, benih kacang panjang 1 sachet, benih semangka 2 sachet dan benih terong 1 sachet untuk 5 Ha di Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Pengembangan kawasan bawang merah dengan menyediakan benih bawang merah sebanyak 1.600 kg (2 Ha) untuk Kota Jambi dan kabupaten Merangin;
- f. Pengembangan kawasan cabe merah dengan menyediakan benih cabe merah sebanyak 300 sachet (25 Ha) untuk 11 kab/kota;
- g. Pengembangan kawasan kentang dengan menyediakan benih kentang G2 sebanyak 4.000 kg (5 Ha) untuk kabupaten Kerinci;

- h. Pengembangan kawasan padi ramah lingkungan kegiatan Bio-CF dengan menyediakan benih padi sebanyak 4.500 kg (180 Ha) untuk kota Sungai Penuh 50 Ha dan kabupaten Kerinci 130 Ha ;
- i. Pengembangan kawasan semangka dengan menyediakan benih semangka sebanyak 22 sachet (2 Ha) untuk kabupaten Tanjab Timur;
- j. Pengembangan kawasan tanaman pangan dengan menyediakan benih padi sebanyak 17.500 kg (700 Ha) untuk Kota Jambi (200 Ha), kabupaten Tebo (200 Ha), Merangin (100 Ha), Kerinci (100 Ha), Sarolangun (100 Ha) dan benih jagung sebanyak 300 kg (20 Ha) untuk Kota Jambi;
- k. Pemeliharaan rutin satwa UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi terdiri dari berbagai jenis dan spesies yaitu jenis Mamalia, berbagai jenis Unggas (Aves), bermacam-macam Reptilia dan Primata serta berbagai jenis hewan ternak. Untuk tahun ini satwa di UPTD ini telah bertambah yaitu 1 ekor harimau Benggala jantan bernama Aden Jelatang dari Lembang Park and Zoo Jawa Barat dan 1 ekor Singa Putih Afrika jantan bernama Mara Pijoan dari Faunaland Ancol Jakarta Utara. Kedatangan 2 satwa ini diharapkan bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan dan mendukung program penelitian satwa di Provinsi Jambi.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 1.265.609.001,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.198.327.984,- (94,68%). Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu (1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi (3) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan (4) Kesejahteraan hewan. Program ini memiliki 1 (satu)

indikator utama yaitu meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi yang tercapai sesuai dengan target kinerja (100%) dan terealisasi 96,73%. Adapun tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya silva pembelian sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk hewan yang dibayar langsung oleh unit usaha secara mandiri untuk menguji produk hewan milik unit usaha tersebut sehingga tidak menggunakan biaya subsidi yang dianggarkan Dinas.

Upaya yang dilakukan pada program ini adalah (1) Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan dan (2) Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak, (3) Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan (4) Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Manfaat program ini adalah meningkatkan populasi ternak dan produksi Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) berkelanjutan.

Adapun rincian capaian kinerja program ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prsentase Meningkatnya keswan kmoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan kmoditas peternakan strategis di Prov. Jambi	%	10	10	1.265.609.001	1.198.327.984

1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan	Kab/Kota	11	11	542.222.000	518.123.106
2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Hewan dan Produk Hewan yang diawasi	Kab/Kota	11	11	126.303.700	126.242.700
3.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Sampel	3000	3000	464.947.001	425.015.328
4.	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	18	18	132.136.300	128.946.850

Output dari program ini sebagai berikut :

- Penyediaan obat-obatan ternak, pengadaan alat kesehatan hewan dan vaksin hewan seperti vaksin Jembrana 80 botol (4.000 dosis), Rabies 1.216 botol (8.000 dosis) dan vaksin SE 40 botol (4.000 dosis);
- Pengamatan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan;
- Pembinaan unit usaha sebanyak 4 unit yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pengawasan qurban dan audit/surveilans NKV;
- Penjaminan daging dan telur yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) melalui sertifikat NKV dan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan pembelian sampel

untuk dilakukan pengujian laboratorium (cemaran mikrobiologi salmonella sp, residu antibiotik dan TPC) sebanyak 9 kg dengan jumlah 30 sampel.

- e. Penyediaan obat-obatan Laboratorium, bahan kimia pemeriksaan laboratorium di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Klinik Hewan, pembelian sampel pangan asal hewan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), aktif servis laboratorium (peningkatan kapasitas petugas lab, pengambilan sampel) serta surveilans KAN dalam rangka mempertahankan akreditasi yang disahkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan adanya persetujuan penambahan ruang lingkup pengujian pullorum pada ternak unggas oleh KAN sehingga terjadi peningkatan permintaan pemeriksaan pullorum dari perusahaan breeding ayam yang ada di Provinsi Jambi, uji ini untuk mendeteksi bakteri *Salmonella pullorum* pada telur ayam dan mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut;

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 663.285.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 642.094.365,- (96,81%). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim untuk 1 (satu) kegiatan dengan target kinerja (100%) dan terealisasi 100%.

Upaya yang dilakukan pada program ini adalah (1) Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (2) Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura yang ditangani.

Manfaat program ini adalah meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Adapun rincian capaian kinerja program ini terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	10	10	663.285.400	642.094.365
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab/Kota	11	11	663.285.400	642.094.365

Output dari program ini sebagai berikut :

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Duku sebanyak 2 unit (kabupaten Batanghari dan Tebo);
- Penguatan Kelembagaan Pos Informasi dan Pelayanan Agens Hayati (IPAH) sebanyak 2 unit (kabupaten Batanghari dan Bungo);
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Duku sebanyak 2 Poktan (120 batang di kabupaten Batanghari dan Tebo);
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Cabe Merah seluas 5 Ha (5 Poktan di kabupaten Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Batanghari dan Sarolangun);
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Bawang Merah seluas 4 Ha (3 Poktan di kabupaten Bungo, Merangin dan Sarolangun);
- Sosialisasi/pengawasan area penanganan Dampak Perubahan Iklim.

6. Program Penyuluh Pertanian

Program ini didukung alokasi anggaran Rp. 461.880.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 447.539.400,- (96,90%). Program Penyuluh Pertanian memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan. Program ini memiliki 1 (satu) indikator utama yaitu kelembagaan pertanian yang meningkat kapasitas untuk 1 (satu) kegiatan dengan target kinerja (100%) dan terealisasi 100%.

Upaya yang dilakukan pada program ini ada 3 (tiga) yaitu (1) Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (2) Jumlah kelompok petani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan dan (3) Jumlah korporasi petani yang didampingi.

Manfaat program ini adalah meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Adapun rincian capaian kinerja program ini terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Program Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prsentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	2	2	461.880.100	447.539.400
1.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	Kab/Kota	11	11	420.240.300	407.894.600
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak	Kab/Kota	11	11	41.639.800	39.644.800

Output dari program ini sebagai berikut :

- a. Pertemuan Inovasi Teknologi Pertanian sebanyak 25 orang di Kota Sungai Penuh;
- b. Peningkatan kapasitas petani muda/petani milenial sebanyak 30 orang di kabupaten Sarolangun;
- c. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebanyak 80 orang di kabupaten Batanghari dan Sarolangun;
- d. Rapat rutin penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Pendampingan manajemen Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebanyak 30 orang di kabupaten Tanjab Barat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.

Pada Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran Tugas Pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian sebanyak 4 (empat) satker yaitu satker TP Tanaman Pangan (109119), satker TP Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121), satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125) dan TP Lahan dan Irigasi Pertanian (691331). Namun dengan mengikuti pedoman Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) yang diberikan untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengalami refokusing anggaran dan blokir anggaran (tidak bisa dilaksanakan). Adapun rincian per satker dan perubahan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1. Anggaran Belanja APBN Menurut Satuan Kerja (Satker) dan Perubahan Alokasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi TA. 2025.

No.	Satker	Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah Refokusing (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu yang Bisa Direalisasikan (Rp)
1.	109119	475.790.000,-	315.700.000,-	0,-	315.700.000,-
2.	109121	131.662.000,-	131.662.000,-	47.100.000,-	84.562.000,-
3.	109125	138.680.041.000,-	17.915.197.000,-	108.800.000,-	17.806.397.000,-
4.	691331	127.857.713.000,-	0,-	1.563.906.000,-	126.293.807.000,-

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Adapun capaian kinerja Tugas Pembantuan untuk program dan kegiatan masing-masing satker adalah sebagai berikut :

I. Satker TP Tanaman Pangan (109119)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SPDIPA- 018.03.4.109119/2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 315.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 305.240.000,- atau 96,67%, dengan realisasi sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sangat mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam bentuk sarana pertanian berupa pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan 1 kegiatan berupa pembinaan, pengawalan, bimbingan, monitoring dan evaluasi luas tambah tanam padi dan jagung.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan pada program ini berupa layanan data dan informasi 1 layanan, layanan pemantauan dan evaluasi 1 dokumen dan layanan manajemen keuangan 1 dokumen.

Adapun rincian capaian program/kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Program/Kegiatan Satker TP Tanaman Pangan (109119) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	(1) Jumlah Produksi Padi, (2) Jumlah Produksi Jagung				20.000.000	19.890.000
1.	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan		Kegiatan	1	1	20.000.000	19.890.000
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				295.700.000	285.350.000
1.	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	244.710.000	234.360.000
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Ditjen TP		Dokumen	1	1	4.950.000	4.950.000
3.	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	1	1	46.040.000	46.040.000
TOTAL ANGGARAN						315.700.000	305.240.000

II. Satker TP Peternakan dan kesehatan Hewan (109121)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 131.662.000 ,- dan realisasi anggaran Rp. 84.540.800,- dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 47.100.000,- namun realisasi fisik 100%, pelaksanaan program kegiatan ini adalah antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan pada program ini berupa layanan BMN 4 layanan, layanan data dan informasi provinsi 1 layanan, layanan pemantauan dan evaluasi 1 dokumen, dan layanan manajemen keuangan 12 dokumen.

Adapun rincian capaian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Program/Kegiatan Satker TP Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Nilai Kerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan				131.662.000	84.540.800
1.	Layanan BMN		Layanan	4	4	9.344.000	5.622.000
2.	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	30.580.000	15.930.000
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1	1	29.348.000	19.836.000
4.	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	12	12	62.390.000	43.152.800
TOTAL ANGGARAN						131.662.000	84.540.800

III. Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.08.4.109125/2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.915.197.000,- dengan realisasi Rp. 17.747.838.543,- dan adanya blokir anggaran sebesar Rp.108.800.000,- sehingga realisasi 99,67%. Program kegiatan yang dilaksanakan pada satker ini adalah antara lain :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan yang ada pada program ini sangat mendukung dalam peningkatan produktivitas pertanian berupa dukungan prasarana antara lain :

- a. Persiapan, monev dan pelaporan berupa monev olah lahan pasca optimasi lahan di Provinsi, kabupaten Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo, Bungo dan Kota Sungai Penuh sebanyak 1.119 kelompok masyarakat.
- b. Bantuan olah lahan di Tanjab Barat seluas 1.063,9 Ha.
- c. Persiapan optimasi lahan berupa monev optimasi lahan rawa di Provinsi, kabupaten Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo, Bungo dan Kota Sungai Penuh.
- d. Perbaikan infrastruktur optimasi lahan di kabupaten Batanghari 276,06 Ha, Kerinci 560 Ha, Tanjab Barat 506,09 Ha, Tanjab Timur 931 Ha dan Kota Sungai penuh 359,8 Ha.
- e. Penyusunan SID optimasi lahan di Provinsi jambi 1 dokumen.
- f. Monev dan pelaporan provinsi SID optimasi lahan untuk luas 12.279 Ha.
- g. Persiapan monev dan pelaporan (QW Intensifikasi) di Provinsi, kabupaten Batanghari, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Sarolangun, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.
- h. Pendataan penerima pupuk bersubsidi sebanyak 86.734 orang di 11 kab/kota.
- i. Verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi di 11 kab/kota.
- j. Laporan pengawasan pupuk dan pestisida berupa persiapan, monev dan pelaporan di 11 kab/kota.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan pada program ini berupa layanan manajemen keuangan 1 dokumen,

Adapun rincian capaian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Program/Kegiatan Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian				17.054.865.000	16.988.675.423
1.	Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan		Kelompok Masyarakat	1119	1119	1.029.533.000	1.029.482.700
2.	Optimasi Lahan		Km2	22	22	12.229.520.000	12.229.489.703
3.	SID Cetak Sawah		Dokumen	1	1	14.537.000	14.536.000
4.	SID Optimasi Lahan		Dokumen	1	1	1.641.995.000	1.641.980.000
5.	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)		Unit	1	1	205.000.000	203.029.000
6.	Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi		Orang	86734	86734	1.479.780.000	1.433.314.300
7.	Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida		Laporan	1	1	454.500.000	436.843.720
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian				860.332.000	759.163.120
1.	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	1	1	860.332.000	759.163.120
TOTAL ANGGARAN						17.915.197.000	17.747.838.543

IV. Satker TP Lahan dan Irigasi Pertanian (691331)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.13.4.691331/2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 127.857.713.000,- dengan realisasi Rp. 93.682.391.326,- dan adanya pagu blokir sebesar Rp.

1.563.906.000,- sehingga realisasi 69,9%. Program kegiatan yang dilaksanakan pada satker ini adalah antara lain :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan yang ada pada program ini sangat mendukung dalam peningkatan produktivitas pertanian berupa dukungan prasarana antara lain :

- a. Bantuan olah lahan pasca optimasi lahan berupa monev olah lahan pasca optimasi lahan sebanyak 13.874 Ha di kabupaten/kota
- b. Bantuan olah lahan sebanyak 6.397 Ha
- c. Persiapan optimasi lahan sebanyak 122,79 km².
- d. Konstruksi (QW Ekstensifikasi cetak sawah) sebanyak 1.500 Ha.
- e. persiapan (QW Ekstensifikasi cetak sawah) dalam rangka SID cetak sawah sebanyak 1 dokumen.
- f. SID (QW Ekstensifikasi cetak sawah) sebanyak 2.500 Ha.
- g. Penyusunan SID Optimasi lahan non rawa 5.882 Ha.
- h. Monev SID (QW Ekstensifikasi cetak sawah) 1 dokumen
- i. Penyusunan SID optimasi lahan 1 dokumen
- j. Monev dan pelaporan SID optimasi lahan 1 dokumen

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan pada program ini berupa layanan manajemen keuangan 1 dokumen,

Adapun rincian capaian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Capaian Program/Kegiatan Satker TP Lahan dan Irigasi Pertanian (691331) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi Tahun 2025.

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian			
				Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
I	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian				127.814.333.000	87.819.757.117
1.	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian		Rekomendasi Kebijakan	4	4	1.150.000.000	-
2.	Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan		Kelompok Masyarakat	13874	13874	11.609.681.000	4.495.483.000
3.	Data Lahan Pertanian		Dokumen	1	1	200.000.000	-
4.	Optimasi Lahan		Km2	123	123	57.058.118.000	42.200.362.997
5.	Cetak Sawah (QW)		Hektar	1500	1500	54.070.000.000	37.540.495.120
6.	SID Cetak Sawah		Dokumen	1	1	2.212.826.000	2.195.211.000
7.	SID Optimasi Lahan		Dokumen	1	1	1.513.708.000	1.388.205.000
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian				43.380.000	43.380.000
1.	Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	43.380.000	43.380.000
TOTAL ANGGARAN						127.857.713.000	87.863.137.117

3.4. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.4.1. Hambatan/Permasalahan

Adapun Hambatan/Permasalahan yang mendasar saat ini adalah:

1. Alih Fungsi Lahan
2. Dampak Perubahan Iklim
3. Kelangkaan Pupuk
4. Masih terjadi kelangkaan benih
5. Terbatasnya kapasitas pengelola alsintan dalam pemanfaatan bantuan Alsintan, baik keterbatasan dalam manajerial maupun tenaga operator yang menyebabkan pemanfaatan alsintan tidak optimal.
6. Belum optimalnya peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam melakukan audit rutin dan penindakan hukum terhadap pelanggaran di tingkat kios berupa penyimpangan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) dan peredaran pupuk atau pestisida ilegal/kedaluwarsa.
7. Tidak adanya bantuan dan distribusi semen beku bantuan Kementerian Pertanian ke Kabupaten/Kota sehingga mengurangi pelaksanaan Inseminasi Buatan;

3.4.2. Upaya Penyelesaian

Upaya/langkah-langkah yang dilakukan :

1. Melakukan Identifikasi dan pemantauan serta pemetaan wilayah
2. Menyampaikan informasi kepada petugas/Kelompok tani/petani, tentang
Perubahan iklim
3. Memperbaiki jaringan tertier dan irigasi pada setra pertanaman tanaman pangan
4. Melakukan Penanaman sesuai jadwal dan kesepakatan kelompok

5. Melakukan pembinaan dan pengawalan pada kelompok tani penangkar benih padi agar lebih optimal menyediakan benih padi bermutu dan bersertifikat
6. Mensinergikan antara P3A, Kelompok Tani, Gapoktan dan UPJA dalam peningkatan produksi tanaman pangan
7. Mengupayakan peningkatan keterampilan dan manajerial melalui pelatihan bagi pengelola UPJA agar pengelolaan Alsintan oleh UPJA bisa dilakukan secara profesional.
8. Dukungan anggaran untuk mengatasi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, sosialisasi penurunan HET dan implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025 serta anggaran pengujian sampel pupuk non subsidi dan pestisida guna mengatasi peredaran pupuk dan pestisida palsu, illegal dan tidak sesuai standar mutu.
9. Menganjurkan kepada pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan dana talangan melalui APBD II dan swadaya dari peternak.
10. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam antisipasi perubahan iklim
11. Melakukan pengawasan pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh PPNS
12. Dukungan berupa partisipasi Pemerintah Pusat dan Daerah baik anggaran dan pembinaan dalam memfasilitasi Program dan Kegiatan agar meningkatkan nilai tambah dan nilai jual suatu produk.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian secara sinergi.

Jambi, Februari 2026

**Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,**



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

URUSAN PERTANIAN PROVINSI

17. Urusan Pertanian Provinsi

IKK Outcome No.3.c.1

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun 2025} - \text{Produksi tanaman pangan tahun 2024}}{\text{Produksi tanaman pangan tahun 2024}} \times 100$ Padi : $\frac{367.791 - 281.022}{281.022} \times 100 = 30,87 \%$ Jagung : $\frac{26.738 - 10.531}{10.531} \times 100 = 153,89 \%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	• Pembilang - Produksi tanaman pangan tahun 2025 dikurang Produksi tanaman pangan tahun 2024 adalah perubahan total produksi tanaman pangan yang dihasilkan di wilayah provinsi pada tahun berjalan (Tahun 2025) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2024). - Produksi tanaman pangan yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari komoditas tanaman pangan utama yang terdiri dari padi dan jagung yang diukur dalam satuan ton. • Penyebut Produksi tanaman pangan tahun 2024 adalah total produksi tanaman pangan pada tahun sebelumnya.

5. Data Pendukung	:	• Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi tanaman pangan tahun 2025 (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi jumlah produksi tanaman pangan tahun 2024 (tahun sebelumnya).
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang dan Penyebut : 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ; 2. Rincian data jumlah produksi tanaman pangan tahun 2025 yang memuat nama Kabupaten/Kota, jenis tanaman pangan, total produksi ; 3. Rincian data jumlah produksi tanaman pangan tahun 2024 yang memuat nama kabupaten/kota, jenis tanaman pangan, total produksi 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain : a. Halaman 1 (Judul) ; b. Halaman pertengahan ; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor ; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada <i>link google drive</i>
7. Dasar Hukum		• Undang – undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ; • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Pasal 25 dan 26) ; • Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 13 tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2025
DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Jenis Tanaman Pangan	Produksi Tahun 2024	Produksi Tahun 2025	Selisih	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Padi (Ton GKG)	281.022	367.791	86.769	
2.	Jagung (Ton JPK-KA 14%)	10.531	26.738	16.207	
	Jumlah	291.553	394.529	102.976	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2025
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Padi		Jagung		Total Produksi	Keterangan
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKG)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton- JPK KA 14%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KERINCI	16.755	93.520	1.213	7.195	100.715	Sumber Data : KSA BPS Prov.Jambi
2	MERANGIN	13.430	53.450	373	2.214	55.664	
3	SAROLANGUN	5.490	21.870	149	886	22.756	
4	BATANG HARI	7.252	29.870	189	1.119	30.989	
5	MUARO JAMBI	4.894	18.194	640	3.795	21.989	
6	TANJAB TIMUR	8.124	34.559	688	4.083	38.642	
7	TANJAB BARAT	7.564	35.025	280	1.661	36.686	
8	TEBO	6.646	27.951	614	3.645	31.596	
9	BUNGO	5.394	23.852	226	1.338	25.190	
10	JAMBI	414	1.907	91	537	2.444	
11	SUNGAI PENUH	4.411	27.593	45	265	27.858	
JUMLAH		80.373	367.791	4.508	26.738	394.529	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

Format Sumber Data
Pembilang
IKK 3.c.1

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/ Kota	Padi		Jagung		Total Produksi	Ket.
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKG)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton- JPK KA 14%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KERINCI	16.332	86.791	308	2.139	88.930	Sumber Data : KSA BPS Prov.Ja mbi
2	MERANGIN	5.505	21.116	255	1.771	22.887	
3	SAROLANGUN	3.428	14.111	38	261	14.372	
4	BATANG HARI	5.069	19.186	67	467	19.653	
5	MUARO JAMBI	5.773	19.475	44	304	19.779	
6	TANJAB TIMUR	6.903	26.838	171	1.190	28.028	
7	TANJAB BARAT	5.946	27.832	184	1.277	29.109	
8	TEBO	3.548	16.406	273	1.899	18.305	
9	BUNGO	3.607	15.865	138	962	16.827	
10	JAMBI	341	1.425	18	125	1.550	
11	SUNGAI PENUH	5.173	31.977	20	136	32.113	
JUMLAH		1.626	281.022	1.514	10.531	291.553	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007

IKK Outcome No.3.c.2

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\text{Produksi hortikultura tahun 2025} - \text{Produksi hortikultura tahun 2024}}{\text{Produksi hortikultura tahun 2024}} \times 100$ Cabe Merah : $\frac{214.628,8 - 171.457,1}{171.457,1} \times 100 = 25,18 \%$ Bawang Merah : $\frac{21.855,9 - 12.287,7}{12.287,7} \times 100 = 77,87 \%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	• Pembilang - Produksi hortikultura tahun 2025 dikurang Produksi hortikultura tahun 2024 adalah perubahan total produksi hortikultura yang dihasilkan di wilayah provinsi pada tahun berjalan (Tahun 2025) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2024). - Produksi hortikultura yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari tanaman hortikultura yang meliputi komoditas sayuran, buah, tanaman hias dan bahan obat nabati dalam satuan ton. • Penyebut Produksi hortikultura tahun 2024 adalah total produksi hortikultura pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	• Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi hortikultura tahun 2025 (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi jumlah produksi hortikultura tahun 2024 (tahun sebelumnya).

6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang dan Penyebut : 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ; 2. Rincian data jumlah produksi hortikultura tahun 2025 yang memuat nama Kabupaten/Kota, jenis komoditas hortikultura, total produksi ; 3. Rincian data jumlah produksi hortikultura tahun 2024 yang memuat nama kabupaten/kota, jenis komoditas hortikultura, total produksi 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain : e. Halaman 1 (Judul) ; f. Halaman pertengahan ; g. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor ; dan h. Dapat menyertakan rincian data pada <i>link google drive</i>
7. Dasar Hukum		• Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura • Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2015 tentang Hortikultura • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dptph.jambiprov.go.id

Format Data Pendukung
Pembilang/Penyebut
IKK 3.c.2

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI HORTIKULTURA TAHUN 2025 DAN
PRODUKSI HORTIKULTURA TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Komoditas Hortikultura	Produksi Tahun 2024 (Ton)	Produksi Tahun 2025 (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cabai Merah	171.457,1	214.628,8	43.171,7	Sumber Data : BPS Provinsi Jambi Tahun 2025
2.	Bawang Merah	12.287,7	21.855,9	9.568,2	Sumber Data : BPS Provinsi Jambi Tahun 2025
Jumlah		183.744,8	236.484,7	52.739,9	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2025
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Produksi Komoditas Cabe Merah (Ton)	Produksi Komoditas Bawang Merah (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	KERINCI	207.799,8	21.332,4	
2	MERANGIN	3.295,9	180,2	
3	SAROLANGUN	142,2	-	
4	BATANG HARI	895,2	-	
5	MUARO JAMBI	1.307,2	-	
6	TANJAB TIMUR	210,9	-	
7	TANJAB BARAT	147,7	-	
8	TEBO	58,7	2,0	
9	BUNGO	407,0	-	
10	JAMBI	31,4	16,8	
11	SUNGAI PENUH	332,8	324,5	
JUMLAH		214.628,8	21.855,9	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Produksi Komoditas Cabe Merah (Ton)	Produksi Komoditas Bawang Merah (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	KERINCI	162.363,3	10.987,0	
2	MERANGIN	4.420,5	311,4	
3	SAROLANGUN	94,9	-	
4	BATANG HARI	1.791,2	-	
5	MUARO JAMBI	1.335,7	149,2	
6	TANJAB TIMUR	267,1	4,7	
7	TANJAB BARAT	209,0	1,5	
8	TEBO	77,4	344,2	
9	BUNGO	427,2	62,5	
10	JAMBI	24,0	1,2	
11	SUNGAI PENUH	446,7	426,0	
JUMLAH		171.457,1	12.287,7	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007

IKK No. 3.c.3**Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan****Penjelasan IKK**

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur tingkat produksi komoditas peternakan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N - \text{Produksi komoditas peternakan tahun } N-1}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N-1} \times 100\%$ Daging Sapi : $\frac{5.444 - 4.524}{4.524} \times 100 = 20,33 \%$ Daging Kambing : $\frac{434 - 468}{468} \times 100 = -7,26 \%$ Daging Ayam : $\frac{64.323 - 58.581}{58.581} \times 100 = 9,80 \%$ Telur : $\frac{41.692 - 39.114}{39.114} \times 100 = 6,59 \%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang - Produksi komoditas peternakan tahun 2025 dikurang Produksi komoditas peternakan tahun 2024 adalah perubahan total produksi komoditas peternakan yang dihasilkan di wilayah provinsi pada tahun berjalan 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024. - Produksi komoditas peternakan yang dimaksud adalah hasil panen dari budidaya ternak yang terdiri dari Daging, Telur dan Susu. ▪ Penyebut - Produksi komoditas peternakan tahun 2024 adalah total hasil panen/produksi komoditas peternakan pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi komoditas peternakan tahun 2025 (pelaporan); dan

		5. Rekapitulasi jumlah produksi komoditas peternakan tahun 2024 (tahun sebelumnya).
6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang dan Penyebut : 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 2. Rincian data jumlah produksi komoditas peternakan tahun 2025 yang memuat nama kabupaten/kota, jenis komoditas, total produksi; 3. Rincian data jumlah produksi komoditas peternakan tahun 2024 yang memuat nama kabupaten/kota, jenis komoditas, total produksi 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada link <i>google.drive</i>.
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang pemberdayaan peternak



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

Format Data Pendukung
Pembilang dan Penyebut
IKK 3.c.3

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN 2025
DAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Komoditas Pernakan	Produksi Tahun 2024 (Ton)	Produksi Tahun 2025 (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daging Sapi	4.524	5.444	920	Sumber Data : Ditjen Pernakan dan Keswan (ASEM2025)
2	Daging Kambing	468	434	(34)	Sumber Data : Ditjen Pernakan dan Keswan (ASEM2025)
3	Daging Ayam	58.581	64.323	5.742	Sumber Data : Ditjen Pernakan dan Keswan (ASEM2025)
4	Telur	39.114	41.692	2.578	Sumber Data : Ditjen Pernakan dan Keswan (ASEM2025)
Jumlah		102.687	111.893	9.206	

Jambi, 05 Februari 2026

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya

NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dptph.jambiprov.go.id

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 3.c.3

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN 2025
DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Produksi Daging Sapi (Ton)	Produksi Daging Kambing (Ton)	Produksi Daging Ayam (Ton)	Produksi Telur (Ton)	Ket.
(1)	(2)	(3)				(4)
1	KERINCI	1.031	13	1.930	1.239	
2	MERANGIN	998	85	6.561	302	
3	SAROLANGUN	158	24	1.286	47	
4	BATANG HARI	269	62	3.216	216	
5	MUARO JAMBI	23	19	30.914	31.079	
6	TANJAB TIMUR	45	15	1.447	2.945	
7	TANJAB BARAT	413	49	1.126	204	
8	TEBO	1.260	58	3.216	939	
9	BUNGO	358	67	10.292	480	
10	JAMBI	429	32	3.859	2.265	
11	SUNGAI PENUH	458	11	476	1.975	
JUMLAH		5.444	434	64.323	41.692	

Jambi, 05 Februari 2026

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR

Pembina Utama Madya

NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 62404, Fax (0741) 62829
www.dtphp.jambiprov.go.id

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN 2024
DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No	Kabupaten/Kota	Produksi Daging Sapi (Ton)	Produksi Daging Kambing (Ton)	Produksi Daging Ayam (Ton)	Produksi Telur (Ton)	Ket.
(1)	(2)	(3)				(4)
1	KERINCI	405	13	1.757	1.157	
2	MERANGIN	891	74	5.975	281	
3	SAROLANGUN	113	7	1.172	44	
4	BATANG HARI	165	68	2.929	201	
5	MUARO JAMBI	83	20	28.154	29.233	
6	TANJAB TIMUR	147	14	1.318	2.751	
7	TANJAB BARAT	377	29	1.025	189	
8	TEBO	786	60	2.929	876	
9	BUNGO	277	147	9.373	431	
10	JAMBI	695	27	3.515	2.107	
11	SUNGAI PENUH	588	9	433	1.844	
JUMLAH		4.524	468	58.581	39.114	

Jambi, 05 Februari 2026
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP.19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 7066200-7066300, Fax (0741) 64585

www.dtpnp.jambi.go.id

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1. IKK Outcome : Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun } N - \text{produksi tanaman pangan tahun } N-1}{\text{Produksi tanaman pangan tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi dan luas panen hanya difokuskan pada pangan prioritas (padi dan jagung)
Padi	:	$\frac{367.791 - 281.022}{281.022} \times 100 = 30,87 \%$	Sumber : KSA BPS Prov. Jambi Tahun 2025
Jagung	:	$\frac{26.738 - 10.531}{10.531} \times 100 = 153,89 \%$	Sumber : KSA BPS Prov. Jambi Tahun 2025

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan - Bantuan Benih Padi untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 880 Ha - Bantuan Benih Jagung untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 20,5 Ha - Penyaluran Pupuk Bersubsidi berupa Urea : 11.891,958 Ton, NPK : 30.733,768 Ton, dan Organik 319,040 Ton - Bantuan Alat dan Mesin Pertanian : 102 Unit - Optimasi Lahan Rawa : 6.397 Ha - Optimasi Lahan Non Rawa : 5.882 Ha - SID Cetak Sawah : 2.500 Ha - Cetak Sawah : 1.500 Ha	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman pangan - Padi : 4.011,815 Ton - Kedelai : 2,4 Ton - Kacang Tanah : 5,1 Ton - Ubi Kayu : 90.003 Ton	Laporan dari UPTD BPSPT
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar - Tanaman pangan : 12 dokumen	Laporan dari UPTD BPSPT
	4)	Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Bantuan Benih Padi untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 100% - Bantuan Benih Jagung untuk Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan : 100% - Optimasi Lahan Rawa : 100% - Optimasi Lahan Non Rawa : 100% - SID Cetak Sawah : 100% - Cetak Sawah : 100%	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi - Jumlah luas pengendalian OPT Tanaman Pangan dalam Provinsi : 3.362,33 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	6) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal Serangan OPT yang dikendalikan - Jumlah areal Tanaman Pangan yang terkendali : 2.754,97 Ha Jumlah Luas Bencana(Kebanjiran dan Kekeringan) dalam Provinsi - Jumlah areal terkena bencana Tanaman Pangan : 12.232,52 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	7) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Penyaluran Pupuk Bersubsidi berupa Urea : 100%, NPK : 100%, dan Organik : 100% - Bantuan Alat dan Mesin Pertanian : 100%	Laporan dari Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	8) Persentase fasilitasi pengendalian OPT - Komoditi Tanaman Pangan Persentase fasilitasi penanggulangan bencana - Komoditi Tanaman Pangan	$\frac{\text{Jumlah area terkendali OPT}}{\text{Luas serangan OPT}} \times 100\%$ - $\frac{2.754,97}{3.273,71} \times 100\% = 84,15\%$ $\frac{\text{Jumlah area yang tertangani}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ - $\frac{1.538,75}{12.232,52} \times 100\% = 12,58\%$	Laporan dari UPTD BPTPH

Jambi, Februari 2026
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi
Telp (0741) 7066200-7066300, Fax (0741) 64585
www.ditphp.jambi.go.id

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1. IKK Outcome : Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi hortikultura dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi tanaman hortikultura tahun } N - \text{produksi tanaman hortikultura tahun } N-1}{\text{Produksi tanaman hortikultura tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi hanya difokuskan pada komoditi utama (cabai merah dan bawang merah)
Cabe Merah	:	$\frac{214.628,8 - 171.457,1}{171.457,1} \times 100 = 25,18 \quad \%$	Sumber : BPS Prov. Jambi Tahun 2025
Bawang Merah	:	$\frac{21.855,9 - 12.287,7}{12.287,7} \times 100 = 77,87 \quad \%$	Sumber : BPS Prov. Jambi Tahun 2025

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan : - Bantuan Benih Cabe Merah untuk pengembangan kawasan cabe merah : 25 Ha - Bantuan Bawang Merah untuk pengembangan kawasan bawang merah : 2 Ha - Bantuan Benih Cabe Merah 1 sachet untuk paket percontohan cabe merah : 1 Ha - Bantuan Benih Cabe Rawit 1 sachet untuk paket percontohan cabe rawit : 0,5 Ha - Bantuan Bawang Merah untuk paket percontohan bawang merah : 1 Ha - Bantuan sayur-sayuran seperti benih kacang panjang 1 sachet, benih semangka 2 sachet dan terong 1 sachet : 2 Ha - Bantuan Bibit Buah-buahan Alpukat 300 batang, Durian 250 batang untuk pengembangan kawasan buah-buahan - Bantuan Benih kentang G2 untuk pengembangan kawasan kentang : 5 Ha - Bantuan benih Semangka untuk pengembangan kawasan semangka : 2 Ha - Bantuan motor roda tiga untuk pasca panen hortikultura : 2 Unit	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman - Kentang : 156.000 knol (78.800 kg) - Buah : 12.002 Batang - Bawang Merah : 350 Kg - Cabe Merah : 2.000 Kg	Laporan dari UPTD BPSPT
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar - Tanaman hortikultura : 12 dokumen	Laporan dari UPTD BPSPT
	4)	Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Bantuan Benih Cabe Merah untuk pengembangan kawasan cabe merah : 100% - Bantuan Bawang Merah untuk pengembangan kawasan bawang merah : 100% - Bantuan Benih Cabe Merah 1 sachet untuk paket percontohan cabe merah : 100% - Bantuan Benih Cabe Rawit 1 sachet untuk paket percontohan cabe rawit : 100% - Bantuan Bawang Merah untuk paket percontohan bawang merah : 100% - Bantuan sayur-sayuran seperti benih kacang panjang 1 sachet, benih semangka 2 sachet dan terong 1 sachet : 100% - Bantuan Bibit Buah-buahan Alpukat 300 batang, Durian 250 batang untuk pengembangan kawasan buah-buahan : 100% - Bantuan Benih kentang G2 untuk pengembangan kawasan kentang : 100% - Bantuan benih Semangka untuk pengembangan kawasan semangka : 100% - Bantuan motor roda tiga untuk pasca panen hortikultura : 100%	Laporan dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	5)	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi - Jumlah luas pengendalian OPT Tanaman Hortikultura dalam Provinsi : 357,91 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH
	6)	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	Jumlah areal Serangan OPT yang dikendalikan - Jumlah areal Tanaman Hortikultura yang terkontrol : 73,29 Ha Jumlah Luas Bencana(Kebanjiran dan Kekeringan) dalam Provinsi - Jumlah areal terkena bencana Tanaman Hortikultura : 0 Ha	Laporan dari UPTD BPTPH Laporan dari UPTD BPTPH (Tidak ada laporan)
	7)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ - 0%	
	8)	Persentase fasilitasi pengendalian OPT - Komoditi Tanaman Hortikultura Persentase fasilitasi penanggulangan bencana - Komoditi Tanaman Hortikultura	$\frac{\text{Jumlah area terkontrol OPT}}{\text{Luas serangan OPT}} \times 100\%$ - $\frac{73,29}{135,52} \times 100\% = 54,08\%$ $\frac{\text{Jumlah area yang tertangani}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ - $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Laporan dari UPTD BPTPH Tidak ada laporan dikarenakan telah dilakukan pemanenan lebih awal

Jambi, Februari 2026
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Lingkar Barat I Km. 12 No. 78, Kota Baru, Jambi

Telp (0741) 7066200-7066300, Fax (0741) 64585

www.ditph.jambiprov.go.id

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Provinsi

1. IKK Outcome : Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi peternakan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Keterangan
Rumus	:	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N - \text{produksi komoditas peternakan tahun } N-1}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun } N-1} \times 100$	Perhitungan produksi hanya difokuskan pada komoditi utama (daging sapi, daging kambing, daging ayam dan telur)
Daging Sapi	:	$\frac{5.444 - 4.524}{4.524} \times 100 = 20,33 \quad \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Daging Kambing	:	$\frac{434 - 468}{468} \times 100 = -7,26 \quad \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Daging Ayam	:	$\frac{64.323 - 58.581}{58.581} \times 100 = 9,80 \quad \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)
Telur Ayam	:	$\frac{41.692 - 39.114}{39.114} \times 100 = 6,59 \quad \%$	Sumber Data : Ditjen Peternakan dan Keswan (Angka Sementara 2025)

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1)	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diberikan : - Bantuan Ternak Sapi sebanyak 245 ekor, pakan ternak 32.950 kg dan obat-obatan 35 paket - Bantuan Ternak Kambing sebanyak 301 ekor, pakan ternak 12.500 kg dan obat-obatan 15 paket - Bantuan Ternak Ayam sebanyak 370 ekor, pakan ternak 2.000 kg, obat-obatan 3 paket dan material kandang 3 paket - Bantuan Ternak Itik sebanyak 600 ekor, pakan ternak 3.000 kg, obat-obatan 4 paket dan obat-obatan 4 paket - Bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik yaitu Mesin Grinder Kompos 4 unit, hand sprayer 4 buah, karung jaring 116.312 lembar dan krisbow sekop 8 buah - Bantuan pemberian rumput untuk peningkatan kualitas hijauan pakan ternak yaitu odot 5.000 stek dan rumput indigofera 400 batang - Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies 8.000 dosis, Jembrana 4.000 dosis dan SE 4.000 dosis - Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota : 1 tahun - Promosi produk peternakan dengan memberikan kompensasi daging ayam 10 kg, daging sapi 10 kg, telur 58 kg dan madu 19 botol	SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi SK Penetapan dari Dinas Provinsi Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet Laporan dari UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan dan Bidang Keswan dan Kesmavet Laporan Bidang Peternakan
	2)	Jumlah penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan	Jumlah penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran/sertifikat veteriner untuk hewan dan produk hewan di Kabupaten/Kota - Rekomendasi lalu lintas Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 1.432 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 435 dokumen - Rekomendasi Lalu Lintas Produk Hewan : Dokumen Pemasukan/Pengeluaran (RM) : 4.489 dokumen, Sertifikat Veteriner (SV) : 443 dokumen	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	3)	Dokumen pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan	Jumlah dokumen Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan - Dokumen lalu lintas : 12 dokumen	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	4)	Prasarana peternakan yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan dan Laboratorium Hewan milik Provinsi dan Puskesmas di 11 Kabupaten/Kota : 100%	Laporan dari UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan dan Bidang Keswan dan Kesmavet

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	5) Wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis di Kabupaten/Kota - Jumlah kecamatan yang terkendali penyakit hewan menular strategis : 129 kecamatan	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	6) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis di Kabupaten/Kota - Rabies : 3 ekor - Jembrana : 129 ekor - SE : 57 ekor - LSD : 1 ekor - BEF : 1 ekor - Pnemonia : 8 ekor	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	7) Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah fasilitasi penerbitan Nomor Kontrol Veteriner : 4 unit usaha bersertifikat NKV	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	8) Persentase sarana peternakan yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$ - Bantuan Ternak Sapi, pakan ternak dan obat-obatan : 100% - Bantuan Ternak Kambing, pakan ternak dan obat-obatan : 100% - Bantuan Ternak Ayam, pakan ternak, obat-obatan dan material kandang : 100% - Bantuan Ternak Itik, pakan ternak, obat-obatan dan obat-obatan : 100% - Bantuan alat untuk pengolahan pupuk organik yaitu Mesin Grinder, hand sprayer, karung jaring dan krisbow sekop : 100% - Bantuan pemberian rumput untuk peningkatan kualitas hiauan pakan ternak yaitu odot dan rumput indigofera : 100% - Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan hewan dan vaksin untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yaitu vaksin Rabies, Jembrana dan SE : 100% - Promosi produk peternakan dengan memberikan kompensasi daging ayam, daging sapi, telur dan madu : 100%	Laporan dari Bidang Peternakan; Bidang Keswan dan Kesmavet
	9) Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	$\frac{\text{Luas Wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$ - $\frac{129}{144} \times 100\% = 89,58\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	10) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun berjalan}}{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ - $\frac{392 - 199}{392} \times 100\% = 49,23\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet
	11) Persentase jumlah penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha yang di Audit/Surveilans}}{\text{Jumlah Unit Usaha yang Mendaftar di Aplikasi OSS}} \times 100\%$ - $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Laporan dari Bidang Keswan dan Kesmavet

Keterangan : OSS adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan penerbitan sertifikat NKV

Jambi, Februari 2026
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007